

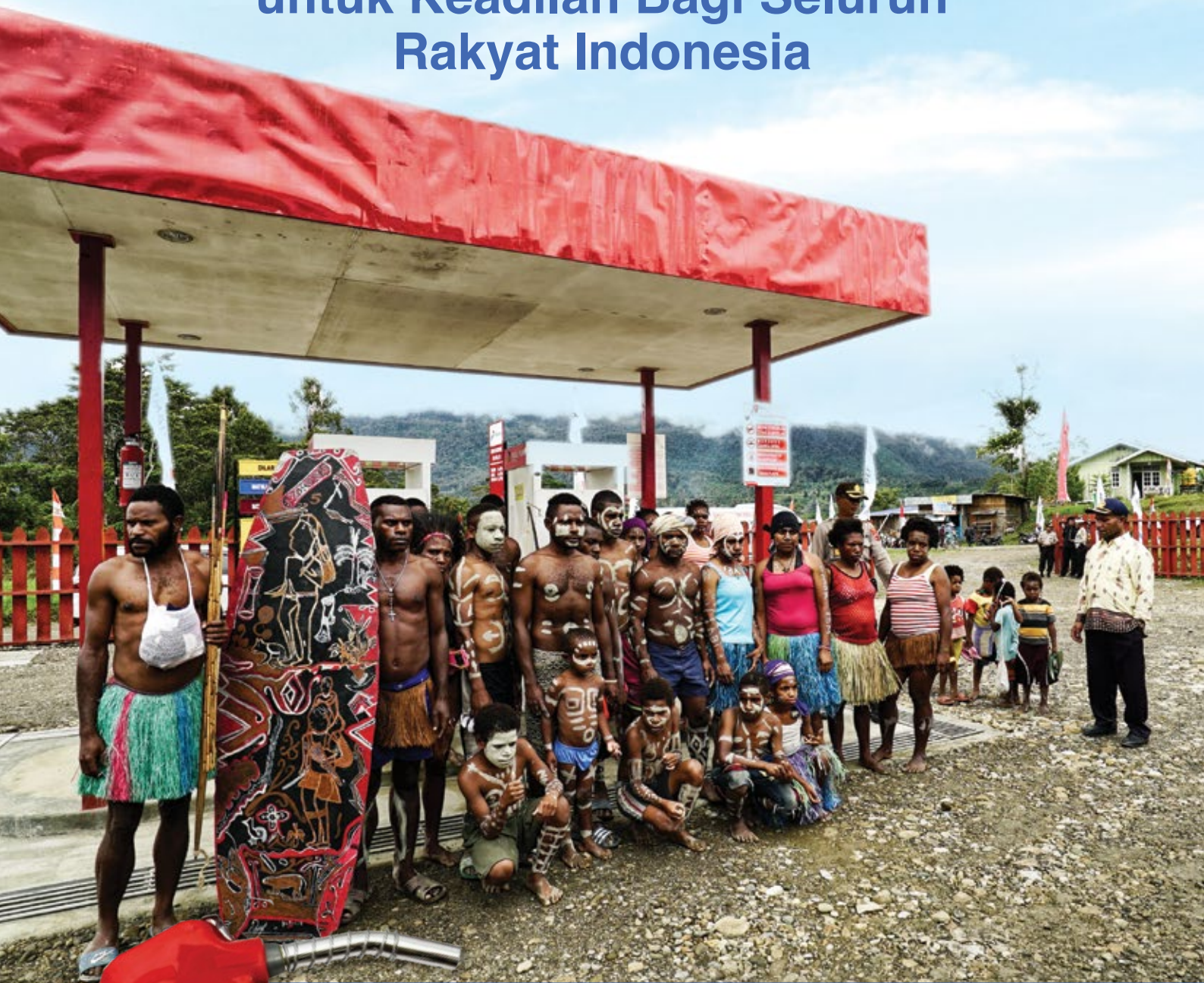
Prospek Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Trans Kalimantan untuk Pembangunan Berkelanjutan



- 8** >> **[sajian utama]**
Siap Kawal Pembangunan Jaringan Pipa Gas Trans Kalimantan
- 24** >> **[sorot]**
Optimis Capai Target 170 Titik BBM 1 Harga Tahun 2019
- 30** >> **[beranda]**
Konsisten Tekan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

BBM 1 Harga

untuk Keadilan Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia



Dalam rangka menegakkan asas keadilan, saat ini daerah terpencil pun sudah dapat menikmati harga BBM yang sama seperti di kota pada umumnya.



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id

Diterbitkan oleh

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pembina

Kepala BPH Migas

Pengarah

Komite BPH Migas

Pimpinan Umum

Sekretaris BPH Migas

Redaktur Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Pimpinan Redaksi

Ady Mulyawan R.

Wakil Pimpinan Redaksi

Daman

Redaksi Ahli

Direktur BBM, Direktur Gas Bumi

Redaksi

I Ketut Gede Aryawan,
Idham Baridwan,
I Gusti Suarnaya Sidemen,
Bukhori Muslim, Anwar Rofiq,
Ayi Endan Harir, Muhammad
Rum Budi S., Dedy Wijaya

Editor

Narcicy Makalew, H Joko Kristadi,
Bagja Ramahtullah, Yosef G,
Dian Puspitasari

Peliputan

Sugianto, Miqdad Ali Akbar, Indra

Desain Grafis

Okto Berbudi, Yogi

Dokumentasi

Ade Mahendra, Imam Sofyan

Sirkulasi

Erna Sulastinah, Asas

e-mail

humas@bphmigas.go.id

website

www.bphmigas.go.id



Jaringan Pipa Transmisi Gas Trans Kalimantan Bernilai Strategis yang Sarat Manfaat

Pemerintah RI tak main-main dalam merealisasikan proyek jaringan pipa transmisi gas Trans Kalimantan. Termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek jaringan pipa transmisi gas Trans Kalimantan memiliki sejumlah keunggulan. Kemudahan investasi dan perizinan adalah beberapa contohnya.

Bagi masyarakat luas, pembangunan pipa gas Trans Kalimantan juga mempunyai beberapa *added value*. Pembangunan pipa gas Trans Kalimantan, misalnya, akan meningkatkan pertumbuhan industri, menyerap tenaga kerja, dan menggerakkan sektor riil.

BPH Migas terus mendorong terwujudnya pembangunan pipa Trans Kalimantan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, khususnya bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan.

Upaya pembangunan pipa gas bumi ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo. Visi tersebut memiliki lima prioritas aspek, khususnya infrastruktur yang salah satu indikatornya adalah Indonesia yang demokratis di mana hasil pembangunannya bisa dinikmati seluruh rakyat. Kelima aspek tersebut meliputi infrastruktur, investasi, kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tepat sasaran.

BPH Migas pun terus mendorong terwujudnya pembangunan pipa Trans Kalimantan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, khususnya bagi seluruh masyarakat di Pulau Kalimantan. Peralpnya, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri juga berarti membantu mengurangi defisit perdagangan melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM), terutama pada sektor kelistrikan dan pertambangan dan juga untuk mendukung kesepakatan Paris Agreement tahun 2015. Tak kalah penting, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri juga merupakan wujud konkret dukungan terhadap pengembangan kawasan industri dengan berbasis *clean energy*.

Daftar Isi



06-07

[sajian utama]
Prospek Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Trans Kalimantan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rencana pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan dapat bersifat strategis yang sangat penting. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur energi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Pulau Kalimantan.

6 [sajian utama]

Prospek Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Trans Kalimantan untuk Pembangunan Berkelanjutan

8 Siap Kawal Pembangunan Jaringan Pipa Gas Trans Kalimantan

11 Mendorong Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU

14 Harga Jual Gas untuk Wujudkan Energi Berkeadilan

16 [profil]

"Kami melibatkan banyak pihak agar ini bukan khayalan belaka"

20 [galeri foto Hilir Migas]

24 [sorot]

Optimis Capai Target 170 Titik BBM 1 Harga Tahun 2019

27 Peran Penting Sub Penyalur dan SPBU Mini

30 [beranda]

Konsisten Tekan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Redaksi menerima tulisan seputar kegiatan **Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Kirimkan ke:

Redaksional Buletin Hilir Migas

Gedung BPH MIGAS, Jl. Kapten P. Tendean No: 28 Jakarta Selatan 12710 – Indonesia, e-mail : redaksi@bphmigas.go.id
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Telp : +62-21 5255500, 5212400, Fax : +62-21 5223210, 5255656



8-9

[sajian utama]
Siap Kawal Pembangunan Jaringan Pipa Gas Trans Kalimantan

Rencana pembangunan Jaringan Pipa Gas Transmisi Kalimantan sudah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional 2016–2035. Meski begitu, masih perlu pembahasan yang komprehensif. Pembahasan komprehensif tersebut harus dilakukan di segala lini, dengan melibatkan *stakeholder* terkait.



11-13

[sajian utama]
Mendorong Pembangunan Jargas dengan Skema KPBU

BPH Migas mendorong agar pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (*jargas*) menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan *jargas* daripada hanya mengandalkan dana APBN.



10-11

[sorot]
Optimis Capai Target 170 Titik BBM 1 Harga Tahun 2019

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, sudah ada 162 titik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang telah menikmati program Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Harga. Itu artinya, sudah 95% target tercapai tahun 2019.

32 [ragam]
Sinergitas Menjaga Mutu BBM

34 [lensa]
Kelangkaan BBM di Tol Trans Sumatera, Kepala BPH Migas Pantau Langsung ke Lapangan

Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas ke Sejumlah Infrastruktur penyediaan BBM di Karawang, Purwakarta, Cikampek, dan Bandung

Kunjungan Kerja ke PLN Rayon Ampera

Kepala BPH Migas Bersama Tim Pantau Ketersediaan Gas LPG Jelang Hari Raya Idul Fitri di Palembang

Tim Posko ESDM Meninjau Kesiapan BBM di Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Kepala BPH Migas Mendampingi Wamen ESDM Tinjau Terminal BBM Plumpang

Pantau Ketersediaan BBM, Kepala BPH Migas Kunjungi Terminal BBM Kertapati

Mantan Menteri ESDM Isi Achievement Motivation Ke-17

BPH Migas Selenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020-2024

Konferensi PERS Posko Nasional ESDM Guna Hadapi Idul Fitri 1440 H Tahun 2019

Peninjauan BBM 1 Harga di Sigi

Sembilan Langkah BPH Migas Jaga Kuota BBM JBT Solar

BPH Migas Tetapkan Harga Jargas Lebih Murah Dibandingkan Harga Pasar LPG

Bulan Oktober, Program BBM 1 Harga Ramping

Tekan Harga BBM Non Subsidi, Pemerintah Pangkas Iuran Badan Usaha

Dorong Kegiatan Hilir Migas, BPH Migas Selenggarakan Hilir Migas Expo 2019

Prospek Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Trans Kalimantan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Rencana pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan dapat bersifat strategis yang sangat penting. Pasalnya, ketersediaan infrastruktur energi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Pulau Kalimantan.



Vitalnya pembangunan pipa Trans Kalimantan mendorong BPH Migas untuk menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait yang berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (31/7).

FGD tersebut turut dihadiri oleh antara lain Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, beberapa gubernur di Pulau Kalimantan lainnya, anggota DPR RI, DPD RI Dapil Kalteng, Bappenas Deputi Kemaritiman, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Komite BPH Migas.

Sangat bermanfaat

Sugianto Sabran dalam sambutannya pada acara tersebut menyampaikan, pihaknya sangat mendukung rencana pembangunan pipa Trans Kalimantan ini karena sangat berguna dan bermanfaat, terutama bagi warga Kalimantan Tengah.

la menambahkan, ketersediaan infrastruktur energi dalam hal ini yang berasal dari potensi migas maupun potensi energi yang bersumber dari sumber daya alam lain sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Pulau Kalimantan pada umumnya.

Sugianto menegaskan bahwa saat ini kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah telah terkoneksi dalam jaringan Kalselteng (Kalimantan Selatan dan Tengah) di mana terdapat pembangkit listrik yang telah beroperasi, yakni PLTMG Bangkanai Kapasitas 155 megawatt dan PLTU Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau kapasitas 2x60 megawatt, sedangkan sisanya ditargetkan selesai tahun 2019 yaitu PLTU Gunung Mas dan yang lain masih dalam proses lelang meliputi PLTU Sampit, PLTMG Bangkanai 2, dan PLTU Pangkalan Bun.

"*Alhamdulillah* saat ini rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah telah mencapai 86,06% atau 1.408 Kelurahan/desa telah dialiri listrik



dari jumlah 1.571 Kelurahan/desa, dan tersisa 163 yang belum berlistrik,” imbuh Sugianto.

Gubernur juga berharap rencana pengembangan dan peningkatan pemanfaatan gas bumi di Kalimantan melalui pembangunan pipa ruas transmisi Trans Kalimantan yang menghubungkan Kilang LNG Bontang, serta melalui empat provinsi di Kalimantan ini dapat mencukupi kebutuhan energi untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah pada masa yang akan datang.

Sugianto pun mengajak seluruh gubernur se-Kalimantan untuk dapat bersama-sama merealisasikan rencana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan ini.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam sambutannya menerangkan bahwa sesuai amanat UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 46 ayat 3 dan 2 bahwa BPH Migas mempunyai sejumlah tugas dan fungsi. Menurut Fanshurullah Asa, ada enam tugas BPH Migas di antaranya adalah mengatur dan menetapkan perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi serta menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa. Tugas-tugas lainnya meliputi mengatur dan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil; mengatur dan menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM; serta mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM dan mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional.

Kemudian, fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan.

BPH Migas juga berharap kepada Gubernur, DPR, DPD RI, Bupati/Walikota, Bappeda untuk dapat menyusun kebutuhan (demand) yang ada di Kalimantan betul-betul riil serta dengan kajian sehingga dapat mewujudkan keadilan energi dan keadilan kewilayahan.

Menggandeng Badan Usaha

Rencana pembangunan pipa gas Trans Kalimantan sepanjang 2.019 kilometer (km) diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp30-35 triliun. Pembangunan pipa trans Kalimantan ini rencananya tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan menggandeng Badan Usaha dengan konsesi 30 tahun.

“Dari standar internasionalnya untuk membangun pipa 1 km on shore, dibutuhkan US\$30-40 ribu. Kalau pipanya off shore beda lagi, sekitar US\$60 ribu per km,” kata Fanshurullah Asa, Kamis (1/08/2019).

Dalam Rencana Induk Tahun 2012-2025, telah direncanakan pembangunan Jalur Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan sepanjang 2.019 Km yang membentang dari Bontang-Banjarmasin-Palangka Raya hingga Pontianak untuk mengangkut Gas Bumi dari Bontang dan Natuna guna memenuhi kebutuhan energi gas alam di seluruh Pulau Kalimantan.

Namun untuk melancarkan pembangunan pipa gas tersebut, harus ada tambahan permintaan. Fanshurullah mengharapkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan serta Pembangunan KEK dan Kawasan Industri (KI) dinilai efektif untuk meningkatkan penyerapan gas di wilayah ini. Nantinya di Kalimantan juga akan dibangun jaringan distribusi termasuk Jaringan gas (jargas).

Potensi pengembangan sumber gas di wilayah Kalimantan ini sangat besar, pada 2024 diperkirakan mencapai 2.609,49 MMSCFD. Jumlah tersebut terdiri dari *existing* 1.388,09 MMSCFD, *project on going* 26,91 MMSCFD dan dua proyek hulu yang akan *first gas in* dari IDD dan ENI sebesar 1.218,20 MMSCFD.

Selain itu, potensi kelebihan pasokan gas bumi di Kalimantan ini diperkirakan sebanyak 40 kargo gas alam cair (LNG) pada tahun 2025 atau sebesar 116.769,6 MMSCF (319,9 MMSCFD). Jumlah ini setara dengan 1.599,5 MW yang berasal dari dua fasilitas gas utama yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, yaitu LNG Tangguh dan LNG Bontang.

Berdasarkan neraca gas bumi Indonesia 2018-2027, diperkirakan Kalimantan mengalami surplus *supply* (berkelebihan pasokan) yang selama ini mayoritas pasokannya, diolah menjadi LNG domestik dan komoditas ekspor.

Namun pemanfaatannya dinilai masih belum optimal, khususnya bagi wilayah Kalimantan yang diperuntukan bagi penggunaan transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil, lifting minyak, industri pupuk, industri berbasis gas bumi hingga pembangkit listrik.

“Untuk itulah pembangunan infrastruktur berupa pipa gas trans Kalimantan diperlukan dan semua itu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah,” terang Fanshurullah.

Pembangunan pipa gas itu juga diperlukan dan sesuai kebutuhan daerah, apalagi saat ini telah dipastikan pemindahan ibu kota negara yang baru akan dilakukan pemerintah pusat ke Kalimantan, yakni antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan. ★

Siap Kawal Pembangunan Jaringan Pipa Gas Trans Kalimantan



Rencana pembangunan Jaringan Pipa Gas Transmisi Kalimantan sudah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional 2016–2035. Meski begitu, masih perlu pembahasan yang komprehensif. Pembahasan komprehensif tersebut harus dilakukan di segala lini, dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Salah satunya melalui penggalangan dukungan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang rencananya akan dihadiri oleh Gubernur, Bupati-Walikota, Anggota DPR RI dan DPD, maupun Rektor PTN se-Kalimantan, serta BPH Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Badan Usaha Hilir Migas, SKK Migas dan Ahli Migas dalam waktu dekat.

Jaringan pipa lebih dari 2.000 Km

“Dalam FGD tersebut akan dibuatkan rekomendasi oleh seluruh peserta FGD, agar rencana pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Gas Trans Kalimantan menjadi Proyek Strategis Nasional,” kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat ditemui di Hotel Mercure, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (15/6).



Dikatakan, FGD diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan dan kesepakatan yang menjadi dasar masukan kepada Pemerintah dalam mengambil kebijakan, agar rencana pembangunan pipa transmisi gas bumi di wilayah Kalimantan dapat segera terwujud.

Fanshurullah menyebutkan akan dibangun jaringan pipa gas di Trans Kalimantan sepanjang 2.200 kilometer (Km). Hal tersebut disampaikan usai Fanshurullah bertemu dengan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Palangkaraya, Kamis (11/7).

Fanshurullah menjelaskan, nantinya jaringan pipa gas itu meliputi Kalimantan Barat–Kalimantan Timur (500 Km), Kalimantan Selatan–Kalimantan Tengah (200 Km), Kalimantan Tengah–Kalimantan Barat (1.000 Km), dan Kalimantan Barat–Natuna (500 Km).

Nantinya, kata Fanshurullah, sumber pasokan gas selain diharapkan dari provinsi lain juga akan mengambil sumber lain yang selama ini sudah siap, yaitu di Kalimantan Timur dan Natuna.

Saat ini, untuk jaringan pipa gas yang sudah terpasang baru berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara itu, untuk provinsi lain, seperti Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih harus dibangun.

Fanshurullah menjelaskan, pengembangan jaringan pipa gas Trans Kalimantan hingga

ke wilayah Kalteng ke depannya dapat dimanfaatkan oleh kawasan industri dengan lebih tepat dan produktif serta mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi rumah tangga. Ia juga berharap pembangunan pipa-pipa gas itu dapat masuk dalam RPJMN Kalteng tahun 2020-2024.

“Jadi nanti polanya adalah investasi sehingga BPH Migas sangat mendorong Pemerintah untuk mewujudkan komitmen pembangunan infrastruktur khususnya di bidang gas bumi di Pulau Kalimantan”, imbuhnya.

Fanshurullah menjelaskan maksud dan tujuan perencanaan pengembangan jaringan pipa gas bumi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) ini berkaitan dengan kepastian pasokan dan kebutuhan permintaan.

“Apabila permintaan di Kalteng tinggi, termasuk juga nanti misalkan Ibukota Negara kelak pindah ke Kalteng, maka akan dapat diwujudkan pipa trans Kalimantan. Hal ini semua bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih bagus dan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkap Fanshurullah.

Saat ini, pembangun jaringan pipa gas sudah pada tahap badan usaha yang mengajukan feasibility study ke BPH Migas dan nantinya bila sudah tuntas baru dilakukan pelelangan. Fanshurullah berharap agar badan usaha

bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya daerah juga dapat menikmati manfaatnya.

“Selain itu, untuk mempercepat pembangunannya pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2019 akan diadakan pertemuan gubernur se-Kalimantan untuk membicarakan masalah ini,” kata Fanshurullah.

Nantinya, menurut Fanshurullah, bila jaringan pipa pipa ini tuntas dibangun, maka industri akan mendapatkan gas yang lebih murah.

“Dan rumah tangga tidak lagi kekurangan pasokan gas.”

Menurutnya, beberapa wilayah di Indonesia yang telah dibangun jaringan pipa transmisi gas, seperti di Pulau Jawa dan Sumatera, terbukti mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh gas.

Ia menambahkan, dengan terbangunnya infrastruktur ruas pipa transmisi dan jaringan distribusi gas bumi hingga ke konsumen, diharapkan dapat mengoptimalkan peningkatan pemanfaatan gas bumi, khususnya di wilayah Kalimantan sebagai energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

“Untuk rumahan harga gas dengan sistem jaringan pipa seperti ini bisa lebih murah dari menggunakan tabung, dan lebih aman,” ujarnya.

“Yang jelas, kami selalu menetapkan harga gas yang dialirkan ke rumah tangga pasti lebih murah dari gas LPG 3 kg,” sambungnya.

Ia pun memastikan, apabila rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas tersebut terlaksana, otomatis bisa membantu menekan pengeluaran keuangan negara. Sebab, selama ini, negara harus mengeluarkan anggaran dengan jumlah besar. Mencapai puluhan triliun untuk mensubsidi LPG 3 kg ke masyarakat.

“Kalau yang ini kan, tidak pakai subsidi, tapi harga murah. Dan tidak perlu impor. Ke manapun terjamin,” ucapnya.

Untuk itu, ia berharap, studi kelayakan yang kini tengah digodok dapat meyakinkan Presiden. Sehingga, rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas Tans Kalimantan tersebut bisa segera masuk dalam program strategis nasional.

“Makanya kalau sudah menjadi kajian, komitmen bersama Kalimantan dan kajian akademik ini memang layak, maka kami akan segera mengusulkan secara kolektif kepada Presiden bahwa ini memang layak jadi proyek strategi nasional,” paparnya.

Artinya, ketika sudah masuk dalam proyek strategi nasional, maka akan ada kemudahan-kemudahan untuk menyiapkan sarana pembangunan infrastrukturnya, terutama kemudahan pembebasan lahan, perizinan, dan kemudahan memperoleh biaya investasi, dengan spesial bunga bank.

Menyambut baik

Di tempat terpisah, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap perencanaan dari Pemerintah Pusat tersebut.

“Kalteng merupakan wilayah yang sangat luas dengan kekayaan Sumber Daya Alam yang berlimpah di dalamnya. Migas di Kalteng penting sebagai salah satu pemasukan daerah maupun negara. Saya selaku Gubernur dan pemerintah Provinsi Kalteng mendukung penuh program yang akan dilaksanakan tersebut,” tegas Sugianto Sabran.

Namun, pembangunan di berbagai sektor termasuk rencana pembangunan pipa gas



Trans Kalimantan itu harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

“Sejak saya menjadi Gubernur Kalteng, kita perlu membangun ekonomi. Tentu dalam membangun pondasi perekonomian yang kuat ada pertimbangan-pertimbangan mengenai resiko, di antaranya kerusakan lingkungan. Namun harus diupayakan meminimalisir sedemikian kecil resiko kerusakan lingkungan bahkan jika perlu jangjan terjadi kerusakan tersebut”, lanjutnya.

Sementara itu, Anggota DPD-RI Permana Sari mengharapkan pembangunan jaringan pipa gas Trans Kalimantan dapat bersinergi dengan pembangunan infrastruktur yang lain sehingga Kalteng tidak tertinggal jauh dari provinsi lain. Saat ini, provinsi Kalteng cukup jauh ketinggalan kemajuannya dari segi infrastruktur.

“Semoga pembangunan jaringan pipa gas trans Kalimantan ini tidak hanya sebuah wacana saja, tetapi dapat terwujud nyata karena rencana telah ada sehingga dapat bersinergi dengan pembangunan yang lain. Harapan saya, rencana tersebut tidak hanya berkembang dari segi energy, namun juga dari segi interkoneksi se-wilayah Kalimantan”, ungkap Anggota DPD RI asal Kalteng tersebut.

Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Prof. Garuda Wiko juga menanggapi terkait rencana pengembangan jaringan pipa gas Trans Kalimantan. Prof. Garuda Wiko mengatakan bahwa pertemuan dirinya dan pihak BPH Migas sudah dilakukan di ruang Rektorat Untan. Pertemuan tersebut membahas tentang rencana pengembangan jaringan pipa gas Trans Kalimantan nantinya.

Sebagai Rektor Untan, ia menyambut baik rencana dan kerjasama yang akan dilakukan ke depan.

“Karena dengan demikian sumber energi kita akan bertambah. Tidak hanya untuk konsumen gas saja tapi juga bisa dimanfaatkan untuk industri lainnya. Jadi bisa mendorong pertumbuhan industri,” ujarnya Minggu (16/6).

Ia mengatakan, selama ini memang pasokan energi yang ada masih dirasakan kurang. Namun, dengan adanya pengembangan pipa gas tersebut akan bisa lebih menambah pasokan.

“Apalagi, gas ini kan ramah lingkungan. Jadi kita menyambut baik. Mungkin nanti peran Universtias juga akan dibutuhkan dalam melakukan kajian-kajian persiapan perwujudan dari jaringan pipa gas tersebut,” terangnya.

Ia sangat menyambut baik hal ini dan akan siap berkontribusi, misalnya dilibatkan untuk melakukan kajian akademis, mengenai perhitungan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan manfaat yang didapat dari adanya jaringan pipa gas tersebut secara ekonomis atau mungkin dalam survei mengenai kesiapan infrastrukturnya.

“Kita tentu terbuka dengan kerjasama BPH Migas demikian juga kita bisa mendorong peranan perguruan tinggi untuk melakukan riset, studi terkait persiapan dari pada penyelesaian dari jaringan pipa gas. Melalui ahli yang kita punya di berbagai prodi untuk melakukan penelitian, dan sosialisasi,” lanjutnya.

Ia berharap, ke depan hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalbar.

★

PERESMIAN JARINGAN

Grabumulih, 30 Maret 2019

Mendorong Pembangunan Jaringan Gas dengan Skema KPBU

BPH Migas mendorong agar pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas) menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut dinilai bisa mempercepat pembangunan jargas daripada hanya mengandalkan dana APBN.

"Kalaupun konsepnya menggunakan APBN itu akan lama tercapai. Kami berharap dengan skema KPBU. Maka, bisa lebih cepat prosesnya," ujar Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa belum lama ini.

Target 1,2 juta SR

KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Menurut Fanshurullah, pembangunan jargas merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dengan tujuan memenuhi kebutuhan energi yang murah, bersih, ramah lingkungan, dan efisien. Dalam RPJMN tersebut ditargetkan 1,2 juta sambungan rumah (SR) terpasang. Namun, hingga saat ini realisasinya masih jauh dari target.

"Baru terealisasi di bawah 300.000. Padahal itu amanah Nawacita juga," imbuhnya.

Bagi Fanshurullah, jargas cukup strategis untuk menekan impor elpiji yang bisa mencapai 60 persen di tengah kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah.

Sementara itu, Pemerintah punya target lebih tinggi dalam membangun infrastruktur jargas untuk rumah tangga. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 sudah ada 4,7 juta SR.

Sementara hingga akhir tahun 2018, jumlah jargas yang dibangun dari dana APBN baru mencapai 443.505 SR. Untuk mencapai target RUEN, diperlukan pembangunan jargas minimal sebanyak 600.000 SR tiap tahunnya sampai 2025.

Oleh sebab itu, diperlukan peran serta berbagai pihak untuk mencapai target-target di atas. Terkait hal ini, rencana subholding gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk membangun 800.000 hingga 1 juta SR tiap tahun patut diapresiasi.

PGN rencananya akan menyerahkan

proposal Feasibility Study (FS) pembangunan jargas. Sejauh ini, PGN telah membicarakan rencana pembangunan jargas kepada Kementerian ESDM.

Untuk pendanaan proyek jargas tersebut, Alimuddin menyebut bisa menggunakan dan dari APBN, BUMN Migas, hingga kerjasama dengan BUMD/Koperasi. Terbuka juga peluang untuk melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema KPBU, maka pendanaan proyek jargas tidak akan mengandalkan dari APBN. Alimuddin bahkan menyebut dana pembangunan jargas bisa didapat dari pinjaman yang dijamin oleh negara.

Terkait hal ini, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Dalam beleid ini, Pemerintah menggratiskan *toll fee* untuk fasilitas bersama yang digunakan untuk jargas seperti fasilitas pengangkutan dan fasilitas penyimpanan.

Pemerintah juga memberi kepastian alokasi gas dari lapangan migas untuk proyek jargas. Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga gas di hulu untuk jargas sebesar US\$4,72 per mmbtu. Namun, harga gas khusus ini hanya untuk jargas bagi rumah tangga dan pelanggan kecil.

Siap mendukung

BPH Migas mendukung penuh penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Fanshurullah mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, bisa menarik pihak swasta untuk turut membangun jaringan gas.

Di sisi lain, kebijakan untuk optimalisasi jaringan gas juga bias menekan impor LPG. Dengan demikian, anggaran impor LPG bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jaringan gas sehingga jargas bisa lebih murah, aman dan lebih gampang untuk masyarakat.

"Sangat mendukung kebijakan untuk optimalisasi jargas daripada wangnya untuk

impor LPG lebih baik digunakan untuk membangun jaringan gas agar bisa lebih murah, aman dan lebih gampang untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan skema pembiayaan pembangunan jaringan gas, dirinya mengatakan hal tersebut bisa dilakukan dengan skema KPBU mengingat jika pembangunan jargas hanya mengandalkan APBN, maka hal itu bisa memberatkan keuangan negara.

Selain itu, imbuhnya, Pemerintah juga bisa menawarkan kepada BUMN dan badan usaha swasta yang ingin berinvestasi dengan kompensasi harga jaringan gas cukup kompetitif dengan harga LPG non subsidi 12 kg.

"Untuk skema opsi tanpa APBN juga bisa pakai skema KPBU seperti infrastruktur lain yang sudah jalan atau untuk cluster rumah tangga (RT) 2 yang masyarakat menengah keatas. Bisa juga ditawarkan ke BUMN atau BU swasta yang mau investasi, nanti harga jargasnya kompetitif dengan harga LPG 12 kg. Sesuai UU Migas pasal 46 poin 2 e, harga gas untuk jargas ditetapkan oleh BPH Migas," ujar Fanshurullah.



PGN sendiri mengaku siap membuka diri untuk membangun jaringan gas dengan pembiayaan internal atau menggunakan skema kerja sama untuk mendukung target pemerintah mempercepat pembangunan jargas sebanyak 5 juta sambungan pada 2025.

Direktur Utama PT PGN Gigih Prakoso mengatakan Peraturan Presiden No.6/2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas bumi melalui Jaringan Transmisi dan/ atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil menjadi dasar pelaksanaan pembangunan proyek Jargas yang akan dilaksanakan PGN.

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Perpres, maka diperlukan Kepmen untuk penunjukkan kepada PGN sebagai pelaksanaan proyek pembangunan Jargas. Memang benar, setelah Perpres tersebut diundangkan, Kementerian ESDM merilis Kepmen ESDM No.11 K/10/EM/2019 tentang penunjukkan PT Pertamina (Persero) atau *subholding* migas dalam membangun jargas.

"Dengan Perpres ini diharapkan pembangunan jargas akan semakin cepat



dengan prioritas tetap untuk sektor rumah tangga dan fasilitas sosial masyarakat yang perlu dibantu oleh Pemerintah, dan dapat dikembangkan juga utk sektor komersial lainnya," tuturnya dalam sebuah kesempatan.

Gigih menambahkan pihaknya tidak menutup diri untuk ikut menggarap proyek Jargas dengan menggunakan dana internal. Hanya saja, pihaknya belum dapat menjelaskan apakah akan mengerjakan sendiri atau menggandeng rekan kerja.

"Perpres ini juga membuka peluang bagi PGN untuk membiayai proyek pembangunan jargas ini dgn pembiayaan sendiri atau kerja sama dengan partner, selain menggunakan APBN," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Utama mengatakan untuk tahun ini pembangunan Jargas memprioritaskan APBN.

"Kalau untuk pengembangan bisa dari pemerintah pusat atau daerah dan BUMN yang ditugaskan," katanya.

Rachmat menambahkan dari Perpres 6/2019, sudah terlihat bentuk insentif dari pemerintah kepada BUMN yang ditugaskan. Setidaknya, dia merujuk pada Pasal 16, 17, 19, 20, 22, dan 28.

Selain itu, pada Pasal 30 Perpres No.6/2019 dijelaskan mengenai ketentuan peralihan Jargas yang telah terbangun pada periode 2009–2014 oleh BUMD, pengoperasian dan pemeliharanya dialihkan oleh Menteri kepada BUMN Migas paling lambat dua tahun sejak ditetapkannya Perpres ini.

BUMN Migas yang ditugaskan yakni PGN, wajib berkoordinasi dengan BUMD untuk melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka pengalihan pengelolaan jargas. ★



Harga Jual Gas untuk Wujudkan Energi Berkeadilan

Pemerintahan saat ini tengah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Tujuannya agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung. Pembangunan jarga juga sekaligus wujud dukungan program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap import bahan bakar bersubsidi APBN (BBM dan LPG 3 kg) untuk beralih ke penggunaan alternatif gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi.

Keseriusan pemerintah ini telah dituangkan dalam sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta sambungan rumah tangga (SR) pada tahun 2025. Hingga akhir tahun 2018, pembangunan jargas telah mencapai 325.773 SR yang tersebar ke 45 wilayah kabupaten/kota.

KPBU merupakan skema pembayaran secara berkala oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJK) kepada badan usaha pelaksana (BUP) atas ketersediaan layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.

Prinsip mewujudkan keseimbangan

Berdasarkan pasal 46 ayat 3 UU Migas 22/2001 dan PP 36/2004 tentang Kegiatan

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa BPH Migas memiliki tugas dan fungsi (tusi) untuk pengaturan atas pelaksana pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK) dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat.



Penetapan harga jual gas bumi yang diberlakukan pada Jargas melalui pipa yang dibangun dengan pembiayaan APBN maupun investasi dari Badan Usaha sendiri dan dikelola Badan Usaha operator penugasan dari Pemerintahan untuk kategori konsumen Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK). Prosedur penetapan harga jual gas RT dan PK untuk Jargas melalui mekanisme Rapat Komite, survei daya beli masyarakat, public hearing, dan Sidang Komite BPH Migas sesuai ketentuan Peraturan BPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011.

Terkait hal di atas, pada 25 Februari 2019 di Jakarta, melalui Sidang Komite BPH Migas yang dipimpin oleh Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa telah ditetapkan harga jual Gas Bumi Melalui Pipa Distribusi untuk tujuh kabupaten/kota. Ketujuh kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Aceh Utara (Aceh), Kota Lhokseumawe (Aceh), dan Kota Medan (Sumatera Utara).

Dalam menetapkan harga jual gas, BPH Migas berprinsip mewujudkan keseimbangan antara Badan Usaha yang wajar, kemampuan daya beli masyarakat dan usaha kecil dengan harga jual gas yang terjangkau dan kebijakan Pemerintah untuk pengembangan pengelolaan Jargas yang berkesinambungan serta diversifikasi energi dari konsumsi LPG ke Jargas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2019 bahwa Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil bukan hanya dilaksanakan oleh BUMN Migas melalui penugasan Pemerintah, tapi dapat juga oleh BUMD, swasta, dan koperasi.

Diharapkan, ini dapat menstimulasi pengembangan Jargas melalui penetrasi market Rumah Tangga (RT)-2 dan Pelanggan Kecil (PK)-2. Namun, mengutamakan kebutuhan Rumah Tangga seperti dijelaskan pada pasal 20 Perpres 6 Tahun 2019. Ditegaskan pada Pasal 27



bahwa penetapan harga jual untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil tersebut adalah menjadi kewenangan BPH Migas.

Bentuk keseriusan Pemerintah

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, pembangunan infrastruktur Jargas ini, salah satu keseriusan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta SR pada tahun 2025.

Dalam penetapan harga gas bumi, BPH Migas mempertimbangkan nilai keekonomian dari badan usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat. Untuk itu, BPH Migas menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jargas untuk tujuh kabupaten/kota yang lebih rendah dibanding harga LPG tabung di pasaran.

“Penetapan harga jual gas bumi yang diberlakukan pada jargas melalui pipa yang dibangun dengan pembiayaan APBN maupun investasi dari badan usaha sendiri dan dikelola badan usaha operator penugasan dari Pemerintah,” tuturnya.

Dia menambahkan, ada beberapa kategori harga jual gas bumi konsumen RT dan PK. Pada RT-1, misalnya, meliputi rumah susun, rumah sederhana rumah sangat sederhana dan sejenisnya, dengan harga Rp4.250 per meter kubik.

“Kedua Rumah Tangga 2 (RT-2) meliputi rumah menengah ke atas, rumah mewah. Apartemen dan sejenisnya, sebesar Rp6.250 per meter kubik,” katanya.

Ketiga, lanjut dia, Pelanggan Kecil 1 (PK-1) meliputi RS pemerintah, puskesmas,

panti asuhan, tempat ibadah. Lembaga pendidikan pemerintah, lembaga, keagamaan, kantor pemerintah, lembaga sosial dan sejenisnya sebesar Rp4.250/M3.

“Keempat Pelanggan Kecil 2 (PK-2) meliputi hotel, restoran atau rumah makan, rumah sakit, ewasta, perkantoran swasta. Lembaga pendidikan swasta, pertokoan atau Mall dan kegiatan komersial sejenisnya, Rp6.250/M3,” katanya.

Untuk ke depan, Jogi Prajogio meneruskan, BPH Migas bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bakal menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa jargas di 22 kabupaten/kota tambahan. Sehingga total wilayah yang tersambung pipa jargas menjadi sekitar 74 kabupaten/kota.

“Ada 4 daerah lagi yang akan ditetapkan segera nanti, setelah itu masuk lagi 18 kabupaten/kota di 2019. Itu sedang dibangun, biasanya mereka begitu sudah selesai akan diserahkan kepada PGN,” kata dia.

Dia melanjutkan, hingga akhir tahun lalu sudah ada sekitar 325 ribu Sambungan Rumah (SR) yang terkoneksi dengan pipa jargas. Pihaknya pun memproyeksikan, bakal ada kurang lebih 80 ribu hingga 10 ribu SR tambahan pada 2019 ini.

Dia menuturkan, BPH Migas butuh anggaran dana sebesar Rp1 triliun untuk memperbanyak Sambungan Rumah yang terhubung dengan pipa jargas.

“Jadi setahun itu sekarang negara punya kemampuan hampir Rp 1 triliun, dengan jumlah sambungan maksimum sekitar 100 ribu (SR),” pungkas dia. ★

Wawancara Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa

“Kami melibatkan banyak pihak agar ini bukan khayalan belaka”



Pengawasan kegiatan hilir minyak dan gas bumi (migas), seperti tugas dan fungsi BPH Migas, merupakan pekerjaan besar. Kondisi geografis wilayah NKRI yang terdiri dari banyak pulau menjadi tantangan tersendiri. Maka, sinergitas antar instansi diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut.

BPH Migas dibentuk untuk mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Tugas dan fungsi BPH Migas ini terwujud dalam berbagai kegiatan, seperti pelaksanaan distribusi dan ketersediaan sektor energi saat periode bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2019 (1440 H).

Beberapa catatan penting

Dalam wawancara khusus belum lama ini, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, BPH Migas tergabung dalam posko nasional sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendata dan mengawasi pendistribusian BBM, gas, listrik, dan kebencanaan geologi menghadapi periode hari raya Idul Fitri 2019. Pria yang akrab disapa Ifan ini mengakui, pelaksanaan satgas ESDM periode ini lancar dan aman.

"*Alhamdulillah*, poin utamanya adalah bahwa selama satgas dalam Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini aman dan lancar, baik itu menyangkut BBM, LPG, jargas, listrik, dan juga aspek di bidang geologi. Jadi, kalau kita lihat tidak ada masalah," katanya.

Meski begitu, Fanshurullah meneruskan, ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaan posko nasional ESDM.

"Kalaupun ada catatan-catatan untuk penyempurnaan satgas periode ke depan, termasuk nanti di akhir tahun," ujar Fanshurullah.

Hal pertama, katanya, perlu penataan lebih baik dalam penugasan untuk kios-kios tambahan di sepanjang jalan tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera.

"Kedua, kami meminta *vehicle counter system* di pelabuhan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan. Jadi, semua kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak itu dicatat semua sehingga jika ada potensi penumpukan kendaraan yang ingin menyeberang, maka sudah diantisipasi lalu lintasnya," lanjutnya.

Catatan lainnya, tambah Fanshurullah, adalah terkait LPG.



Ia menyampaikan, "Kalau masalah LPG ada beberapa lokasi yang kami dapatkan informasinya terjadi potensi kelangkaan. Tapi, teratasi dengan operasi pasar. Problem di lapangan agen tidak menjual ke pangkalan-pangkalan yang sudah diatur. Itu ada di kepulauan-kepulauan di Kalimantan".

Target BBM 1 Harga tinggal 8 titik

Ketika ditanya tentang BBM 1 Harga, Fanshurullah berucap, sampai tahun 2019 targetnya 170 titik.

"Sampai hari ini, sudah 162 lokasi yang sudah dioperasikan. Jadi, tinggal 8 lokasi lagi. Mengang yang baru diresmikan baru 131. Jadi, ada 31 lagi yang siap diresmikan. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua dan teman-teman lain juga ada yang ditugaskan meresmikan di tempat-tempat lain," ia menjelaskan.

Fanshurullah yakin, BPH Migas dalam mengawal BBM 1 Harga selama tiga tahun ini berjalan sesuai target, yakni 170 titik sampai tahun 2019. Ia mengakui, Kementerian ESDM telah berencana menambah titik BBM 1 Harga hingga 500 lokasi di tahun 2024.

"Jadi lanjut lagi, bukan selesai di tahun 2019. Tahun 2020 sampai 2024 dilanjut sehingga total BBM 1 Harga terdapat di 500 lokasi.

Penambahannya untuk lima tahun ke depan 330 lokasi, dua kali lipat jumlahnya dari saat ini," tegasnya.

Fanshurullah mengemukakan, penerapan BBM 1 Harga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian.

"Yang menjadi tantangan agar akselerasi untuk mencapai target 500 lokasi ini pertama adalah infrastruktur menuju lokasi BBM 1 Harga. Lokasinya kadang-kadang jauh di dalam. Mobil atau kapal yang menuju titik-titik ini kadang-kadang aksesnya tidak ada," terangnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Fanshurullah, diperlukan sinergitas lintas sektoral. "Ini yang perlu menjalin sinergitas dengan Kementerian PUPR. Kalau nanti sudah dapat list-nya semua untuk 330 lokasi, kita akan koordinasi supaya mungkin dibangun jalan untuk menuju BBM 1 Harga," tambahnya.

Ia melanjutkan, "Kami ingin sekali melibatkan BUMdes (Badan Usaha Milik Desa-**red**) di mana ada dana Rp1 miliar untuk satu desa. Kalau kita bisa kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) bisa bagus sekali karena tidak perlu lagi melibatkan personal,

meskipun boleh. Tapi menjadi Badan Usaha melalui Bumdes tadi. Jadi, dana yang disiapkan Pemerintah yang akan dipakai”.

la meneruskan, “Satu lagi masalah izin-izin. Kita sudah kumpulkan semua bupati 330 lokasi tersebut. Kita minta komitmen mereka karena Pemerintah Pusat telah menetapkan BBM 1 Harga, maka agar dibantu untuk mempermudah masalah perizinan. Selama ini, ada yang terjadi seperti itu. Desa atau kecamatannya dibantu dengan dibangun BBM 1 Harga kok tidak dipermudah izin-izinnya. Ini terjadi, ada di Lampung dan Indonesia Timur,” ungkap Fanshurullah.

“Mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali. Kita minta komitmen. Kalau tidak, Pemerintah bisa saja dengan tegas memindahkan lokasi BBM 1 Harga bukan di kabupatennya. Sebenarnya, kecamatan 3T yang bisa dibangun BBM 1 Harga ini masih banyak. Kami sudah hitung ada 1.582 lokasi lagi. Itu adalah jumlah kecamatan yang belum ada penyalur. Tapi, kita ini bertahap. Lima ratus ini sudah luar biasa. Dananya kemudian alokasi BBM-nya. Jadi, kita bertahap sampai 2024 ada di 500 lokasi. Kalau proses di awal bisa cepat, tidak tertutup kemungkinan ditambah lagi titik BBM 1 Harga,” harapnya.

Terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, pihaknya telah menjalin sinergi dengan Kepolisian RI.

“Kita sudah bekerja sama dengan Kepolisian. Kita punya banyak data. Dalam satu tahun itu bisa ratusan kali kasus. Kita kerjasama dengan Kepolisian, kita tangkap. Kepolisian menangkap. Ditjen Migas juga sebagai saksi ahli untuk proses di pengadilan. Jadi, ada juga BBM disalahgunakan dengan disalurkan dari SPBU, misalnya, diangkut ke industri untuk dijual. Nah, ini kita pantau juga,” tegasnya.

Sinergi yang telah berjalan ini juga akan terus dikembangkan.

“Kita ke depan akan kerjasama dengan BIN, TNI, dan bersama anggota Dewan, khususnya Komisi VII memantau langsung ke lapangan. Semua Badan Usaha yang berjumlah 136, kita cek di seluruh Indonesia apakah mereka ada yang menyimpang atau tidak. Kita berharap ini tidak terjadi karena

ini kan memang hak rakyat kecil yang menikmati BBM bersubsidi,” Fanshurullah melanjutkan.

Tiga aspek pipanisasi

Bergeser ke pipa gas bumi, Fanshurullah mengungkapkan, dasar hukumnya UU Migas itu menjelaskan dalam pasal 46 ayat 3 ada enam tugas BPH Migas, termasuk BBM 1 Harga.

“Tiga lagi ada di bidang pipa gas. Yang seksi itu tugas BPH Migas adalah perusahaan gas transmisi dan distribusi gas bumi nasional. Ini penting. Artinya, BPH Migas itu tugasnya adalah bagaimana melelang untuk menjadi efisiensi, membangun pipanisasi gas transmisi maupun wilayah jaringan distribusi. Sampai saat ini, BPH itu acuannya adalah rencana induk. Ada Kepmen ESDM Tahun 2012 yang menyatakan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Nasional dari tahun 2012-2025. Dengan dasar inilah BPH Migas melelang, contohnya pipa gas Trans Kalimantan. Pipa Trans Kalimantan sebenarnya bukan ide baru. Ini sudah ada di dalam Rencana Induk Jaringan Gas tadi tahun 2012. Masalahnya pipa gas ini layak atau tidak dari segi investasi, feasibility study dan sebagainya,” jelasnya.

Fanshurullah mencatat, ada tiga aspek terkait pipanisasi gas bumi. “Pertama, dari sisi supply side atau pasokan gasnya. Kedua dari sisi *demand side*, adakah *demand*-nya yang membutuhkan gas tadi? Kalau *supply side*-nya siap, *demand*-nya ada termasuk industri, maka infrastruktur akan dibangun. BPH Migas akan melelang,” kata Fanshurullah.

Saat ini, masih menurut Fanshurullah, BPH Migas berdasarkan Kepmen ESDM No.4 Tahun 2012 dan Peraturan BPH Migas No.15 membuka kepada Badan Usaha yang sudah berjumlah kurang-lebih hampir 50 Badan Usaha yang mengantongi izin pengangkutan dan niaga gas.

“Kita undang, ada peluang pipa transmisi gas, ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada kawasan industri. Sekarang sudah ada sekitar hampir 20 Badan Usaha yang mengajukan FS dan Front and Engineering Design (FED) kepada

BPH Migas. Setelah Rencana Induknya segera dikeluarkan oleh Menteri ESDM, BPH Migas akan melelang. Lokasinya bermacam-macam. Ada di Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Jawa, Sulawesi, bahkan Kalimantan. Ada PGN, ada swasta. Itu pipa transmisi. Ada pula Wilayah Jaringan Distribusi (WJD). Pemenang lelang ini akan memiliki hak khusus untuk kawasan itu atau pipa pada ruas tertentu selama minimal 30 tahun,” tambahnya.

Fanshurullah menyatakan, ada syarat-syarat tertentu agar Badan Usaha bisa memiliki izin pengangkutan dan niaga gas bumi.

“Badan Usaha atau perusahaan yang memiliki izin pengangkutan tadi mesti membuat FS dan FED. Nanti, BPH Migas akan membentuk panitia lelang yang komprehensif terdiri dari Ditjen Migas, Irjen. Pemenangnya akan memiliki semacam konsesi hak khusus selama minimal 30 tahun untuk pengelolaan pengembangan kawasan. Sekarang ini, kawasan yang mengajukan WJD, PGN saja mengajukan 770 WJD. Ini kan signifikan. BPH Migas juga akan membangun pipa gas bumi Trans Kalimantan. Asumsi kami ada pasokan gas yang mungkin diekspor atau uncommitted bisa dipakai untuk infrastruktur dalam negeri sehingga tidak ada masalah lagi telur dan ayam siapa yang duluan,” ungkapnya.

Terkait pembangunan pipa Trans Kalimantan, Fanshurullah optimis, dapat menyerap pasar yang tersedia. Terlebih, ada wacana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan.

“Nanti rencana dalam FGD yang kita mau susun di Kalteng bulan Juli 2.000 kemudian September di Kalbar. Kita kumpulkan gubernur, bupati, anggota DPRD se-Kalimantan, termasuk nanti mungkin SKK Migas. Kita undang semua untuk membahas ini. Belum lagi ada wacana memindahkan ibukota ke Kalimantan. Kalau ini terjadi, coba bayangkan ada sekian puluh kementerian, lembaga. Harapan kami Kalimantan adalah paru-paru dunia yang mesti menjadi basis kita. Dengan adanya isu pemanasan global, maka tolong pakai gas, jangan pakai solar atau batubara yang merusak lingkungan dan gas kita ada,” tambahnya.

Optimisme Fanshurullah juga didukung fakta mulai munculnya sejumlah kepala daerah yang berminat mengembangkan pipa gas bumi.

"Alhamdulillah, Desember lalu kami pulang dari Kalimantan Timur dan gubernurnya mendukung penggunaan gas di Kaltim di Lapangan Bontang untuk diprioritaskan di dalam negeri. Gubernur Kalbar juga mendukung. Kami melibatkan banyak pihak agar ini bukan khayalan belaka," ujarnya.

Fanshurullah mencontohkan, saat pembangunan Tol Trans Jawa ditargetkan selesai dalam waktu empat tahun, banyak yang pesimis.

"Banyak yang tidak yakin bisa bangun jalan tol 900 km dalam waktu empat tahun. Faktanya 900 km sepanjang Jawa dan 400 km di Sumatera. Artinya bila BPH Migas punya ide atau mimpi besar dengan jaringan pipa Trans Kalimantan. Itu bukan hal mustahil," Fanshurullah optimis.

Optimisme Fanshurullah bertambah dengan terbentuknya Holding BUMN di berbagai sektor. Pasalnya, pembangunan infrastruktur pipa gas bumi Trans Kalimantan berpotensi terdapat persinggungan secara fisik, misalnya dibangun di bawah perlintasan kereta api dan sebagainya.

"PGN akan menjadi penggerak utama pembangunan jaringan transmisi pipa gas bumi ini. Sebanyak 770 lokasi sudah diajukan PGN. Belum yang swasta. Kalau ini bisa diwujudkan, bayangkan pertumbuhan ekonomi akan makin bagus karena harga gas jauh lebih murah bila dibandingkan dengan solar. Maka, biaya produksi pun makin turun. Investasi pun bisa masuk ke Indonesia dan menyerap tenaga kerja," ungkapnya.

Tak lupa, Fanshurullah juga menjelaskan tentang proyek jargas. Ia menjabarkan, *"Sekarang APBN untuk LPG 3 kg sekitar Rp75 triliun setahun. Apalagi kalau*

mengetahui 60% LPG kita adalah impor. Sementara kita punya gas melimpah. Kalau jargas terbangun, maka mengurangi subsidi LPG dan impor BBM," lanjutnya.

"Harga gas LPG 3 kg yang menetapkan adalah BPH Migas yang sudah ada di 40 kabupaten/kota selalu di bawah harga LPG 3 kg. Sudah tidak subsidi, harganya pun lebih rendah. Tahun ini, Menteri ESDM sudah mengusulkan untuk penambahan anggaran jargas Rp3,5 triliun yang selama ini berkisar di angka Rp1 triliun. Artinya, akan terbangun tahun 2020 sebanyak 390 ribu SR. Selama ini, di bawah 100 ribu SR dalam setahun. Selain itu, sudah ada Perpres 06 Tahun 2019, di mana membuka ruang investor bagi BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan bernilai keekonomian. Artinya misalnya untuk rumah elit. Ini bisa investor masuk. Nanti, BPH Migas akan menetapkan harga setara LPG 12 kg. Ini kalau terbangun akan luar biasa pemanfaatan gas di dalam negeri," tutupnya. ★





galeri foto **Hilir Migas**



★ | Harteknas, Bali 26 Agustus 2019



★ | HUT BPH Migas, 7-9 Agustus 2019



★ | Hilir Migas Expo 2019





galeri foto **Hilir Migas**



★ | Kunjungan Menteri ESDM, Ignasius Jonan ke BPH Migas, 14 Agustus 2019



★ | Achievement motivation bersama Luluk Sumiarso, 21 Agustus 2019



★ Pelantikan Pejabat Eselon II-IV oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan
19 Juni 2019



★ Raker bersama Menteri ESDM, Ignasius Jonan
dengan Komisi 7 DPR, 20 Juni 2019



Optimis

Capai Target 170 Titik BBM 1 Harga Tahun 2019

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, sudah ada 162 titik di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang telah menikmati program Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Harga. Itu artinya, sudah 95% target tercapai tahun 2019.





"Sampai hari ini sudah 162 titik yang sudah dioperasikan, masih ada delapan lokasi lagi. Di 2019 ini kan targetnya 170 titik," ujar Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melalui keterangan resminya, Senin (1/7).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dari 162 titik yang sudah beroperasi, baru 131 titik yang sudah diresmikan.

"Masih ada 31 yang siap diresmikan. Pak Jonan (Menteri ESDM) rencananya akan segera meresmikan (BBM 1 Harga) di Pulau Rote, NTT. Saya sendiri nanti akan meresmikan di Papua," jelasnya.

Kendati demikian, tambahnya, semua berjalan sesuai dengan target.

Pemetaan 1.502 lokasi

Kebijakan BBM 1 Harga direncanakan akan tetap dilanjutkan hingga 2024 mendatang. Karena program ini dianggap berhasil, maka akan ada penambahan sebanyak 330 titik dalam lima tahun ke depan. Total, akan ada 500 lembaga penyalur hingga akhir tahun 2024.

"Tambahnya untuk 5 tahun ke depan itu, 330 lokasi. Dua kali lipat dari yang ada saat ini," sambung Fanshurullah.

Pemerintah pun sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur.

Fanshurullah meyakini, tidak menutup kemungkinan semua lokasi akan dipenuhi.

Penyeragaman harga jual resmi BBM di seluruh pelosok Indonesia, jelas Fanshurullah, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengakui, tentunya masih ada beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan dalam menyukseskan BBM 1 Harga. Tantangan utama adalah mengenai kesiapan infrastruktur.

"Yang menjadi tantangan adalah infrastruktur menuju lokasi BBM 1 Harga. Mobil atau kapal yang menuju lokasi ke wilayah 3T. Ini kadang-kadang akses jalannya tidak ada. Ini yang mesti kita sinergikan ke Kementerian PUPR. Supaya mungkin dibangun jalan," ungkapnya.

Selain itu, keterlibatan *stakeholder* terkait juga penting kiranya mendukung program tersebut.

"Kami ingin sekali melibatkan BUMDES. Kami bisa kerja sama dengan Kementerian PDT. Ini bagus sekali," ujarnya.

Tantangan berikutnya adalah perizinan.

"Kami sudah kumpulkan bupati dan minta komitmen mereka untuk mempermudah izin. Kalau tidak Pemerintah akan memindahkan lokasi," ungkap Fanshurullah.

Sebagai informasi, sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah akan membangun 170 lembaga penyalur BBM 1 Harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, dengan rincian 54 Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk.

Sementara itu, pada 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan enam penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Untuk 2019 ini, akan dibangun 39 Lembaga Penyalur BBM 1 Harga, di mana 38 Lembaga Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.

BBM 1 Harga dikhususkan untuk dua jenis BBM, Solar sebesar Rp5.150 dan Premium Rp6.450 yang ditugaskan hanya kepada dua badan usaha, yakni Pertamina dan AKR.

Garda terdepan

Sesuai fungsi yang telah ditetapkan, BPH Migas melakukan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan angkutan gas bumi. Dengan kata lain, BPH Migas sebagai garda terdepan dalam menjamin penyaluran BBM 1 Harga. Sementara dalam penyaluran gas, BPH Migas juga memiliki pemikiran strategis dalam penyaluran gas kepada masyarakat.

Industri migas merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dioptimalkan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan.

UU tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Migas nasional mengingat perundang-undangan sebelumnya (UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) sudah tak lagi sesuai dengan kondisi terkini dan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah NKRI.
- b. Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
- c. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas).

Dalam melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI, BPH Migas harus mengawal program BBM 1 Harga. Dengan kata lain, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI ini dipercaya untuk melaksanakan arahan Presiden RI yang diterbitkan melalui Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016.

BPH Migas, menjadi garda terdepan untuk mengawal dan menjamin amanat BBM 1 Harga agar terlaksana dengan maksimal, meskipun tidak sedikit kendala dan tantangan yang harus dihadapi, khususnya terkait kondisi geografis Indonesia yang

terbagi menjadi pulau-pulau hingga akses menuju lokasi pembangunan lembaga penyalur BBM yang cukup sulit ditembus.

Kebijakan BBM 1 Harga mengikuti pencabutan subsidi BBM dan pemberian penugasan kepada BPH Migas, Pertamina, dan badan usaha swasta untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di tempat tersebut serta mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara.

Selain sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penerapan Program BBM 1 Harga dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi meski masih dirasakan dalam ling'kup terbatas. Pasalnya, titik-titik penerapan program ini menasar daerah 3T terutama di beberapa daerah Indonesia Bagian Timur, yang harga BBM sebelumnya di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya, seperti di Pulau Jawa. Dengan demikian, selisih harga beli ini pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memperbaiki taraf hidup perekonomiannya.

Kebijakan revolusioner BBM 1 Harga ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang bertekad untuk memberikan keadilan energi bagi rakyat khususnya mereka yang berada di berbagai wilayah 3T di seluruh tanah air untuk menggerakkan roda perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

Fanshurullah yakin dan optimis upayanya dalam merealisasikan penyaluran BBM 1 Harga dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya energi yang berkeadilan. Ia yakin kebijakan BBM 1 Harga ini memiliki multi efek yang luar biasa. Tak hanya berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti transportasi hingga pendidikan karena sebagian besar kegiatan masyarakat memang terkait dengan energi, baik langsung maupun tidak.

Pertanian misalnya, meski secara langsung tidak terkait. Namun, untuk memasarkan hasil pertanian, tetap membutuhkan transportasi yang membutuhkan BBM. Begitu pula dengan perikanan, kesehatan, hingga pendidikan, semua akan terkena efek domino kebijakan tersebut. ★





Peran Penting Sub Penyalur dan SPBU Mini

Dalam upaya menjamin ketersediaan BBM dan distribusinya secara merata hingga mampu menyentuh masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau, khususnya di daerah pedalaman seperti Papua, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan adalah keberadaan sub penyalur BBM. Keberadaan Sub Penyalur BBM ini penting guna mendorong pemerataan akses masyarakat terhadap bahan bakar.

Saat ini, total jumlah penyalur di Indonesia sebanyak 7.251 penyalur yang terdiri dari milik Pertamina 7.011 penyalur dan Badan Usaha (BU) lain 240 penyalur. Penyalur yang dimiliki oleh Pertamina atau disebut SPBU COCO hanya 135 penyalur.

Sementara itu, NKRI terdiri dari 514 kab/kota, tentunya jumlah tersebut masih jauh dari optimal. Apalagi untuk membangun SPBU baru membutuhkan investasi yang cukup besar dan itu pun tak serta merta mudah lantaran harus memperhatikan berbagai hal juga pertimbangan. Membangun SPBU, memang

harus melihat sisi keekonomiannya terlebih di daerah terpencil, seperti Papua, dianggap tidak ekonomis bagi sebuah Badan Usaha.

Dikelola secara efektif, efisien, dan transparan

Untuk mengisi yang kosong itulah BPH Migas, membuat sub penyalur-penyalur tambahan yang legal khususnya di Papua. Sehingga, penerapan BBM 1 Harga bisa berlangsung dengan lancar dan aman.

"Karena sektor migas harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan salah satu poin Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran sesuai ketentuan daerah-daerah," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa.

Eksistensi sub penyalur tentu mampu membantu Pemerintah mewujudkan program membangun Indonesia dari pinggiran. Apalagi, sebagian besar daerah yang disasar oleh program sub penyalur ini, lebih banyak di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Bagi BPH Migas, implementasi sub penyalur BBM dilakukan dalam rangka mendukung percepatan BBM 1 Harga dalam agenda nasional pemerintah. Betapa tidak, di beberapa daerah keberadaan SPBU masih menjadi masalah karena jarak yang saling berjauhan.

Misalnya saja kalau di daerah Jawa, jarak antara penyalur (SPBU) dengan penyalur lainnya sudah di bawah 10 kilometer. Sementara, di wilayah Sumatera sendiri jaraknya masih berkisar di level 200 kilometer. Untuk wilayah timur Indonesia, masih sangat memprihatinkan. Sebab, jarak antara satu penyalur dengan penyalur lainnya bisa mencapai 2.300 kilometer. Jarak yang terlalu jauh tersebut, menyisakan berbagai masalah, seperti rawan disalahgunakan dan akses yang sulit terjangkau.

Karena jarak yang tak cukup ideal tersebut, tak heran harga BBM melambung tinggi menjadi Rp25.000 per liternya di daerah yang jauh dari SPBU penyalur karena harus menanggung ongkos distribusi. Bahkan, sebelum pemerintah mengulirkan program BBM 1 Harga, harga premium melampaui angka Rp50.000 per liternya.

Untuk itu, BPH Migas akan bekerja keras dalam memberikan akses energi kepada masyarakat di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, khususnya di pedalaman Papua. Terbukti sudah ada 16 sub penyalur yang terbangun dan tahun ini ada sedikitnya 230 sub penyalur yang telah mengajukan izin ke BPH Migas.

"Sebanyak 16 sub penyalur yang sudah existing di 25 provinsi dari target 230-an di seluruh Indonesia. Di Papua baru ada dua dan itu akan terus ditingkatkan jumlahnya," tegas Fanshurullah.



Target 1.000 kios eceran resmi

BPH Migas pun mengajak badan usaha ataupun koperasi membangun "eceran BBM non-subsidi" di daerah-daerah. Hal tersebut bertujuan agar pengecer-pengecer ilegal tidak lagi beroperasi.

Komite BPH Migas Hendry Ahmad menyampaikan, selain mendorong untuk membangun sub penyalur untuk merealisasikan BBM 1 Harga ke desa-desa, pihaknya juga mendorong pembangunan penyalur-penyalur khusus seperti kios untuk menjual BBM non-subsidi, seperti Peralite.

Sudah ada beberapa Badan Usaha yang sudah berkomitmen untuk menjadi agen 'pengecer resmi' dengan Pertamina.

"Badan Usaha yang sudah menemui Pertamina itu, El Nusa Petrofin, Patraniaga, Vivo, dan AKR Koperindo. Margin-nya business-to-business, untuk BBM non subsidi," jelas belum lama ini.

BPH Migas menjadi fasilitator agar badan-badan usaha tersebut dapat menekan margin sehingga masyarakat tidak terlalu mahal untuk membelinya.

Apabila saat ini masyarakat membeli di pengecer Premium seharga Rp 9.000 sampai Rp 10.000, dengan adanya kios ini masyarakat bisa membeli Pertamina dengan harga Rp 9.000. Tujuan pembangunan kios ini merupakan upaya untuk menerbitkan pengecer ilegal.

BPH Migas menargetkan akan ada 1.000 kios eceran resmi BBM non-subsidi. Mereka yang berminat tinggal mengajukan saja badan usaha yang ingin membangunnya. Kemudian BPH Migas menentukan badan usaha mana yang menjual Pertamina dan Peralite.

DPR dan BPH Migas akan mempelajari lebih lanjut apakah kehadiran Sub Penyalur bisa dimungkinkan terlaksana dengan sumber dana desa. Terlebih untuk menjadi

sub penyalur investasi yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 50-100 juta. Lebih murah dibanding harus membuat SPBU yang mencapai 20 miliar.

PT Pertamina (Persero) pun membuka peluang bisnis bagi masyarakat yang ingin menjual produk-produknya. Dengan menjadi mitra Pertamina, masyarakat bisa mengelola Pertashop, SPBU mini yang khusus menjual produk Pertamina mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, pelumas (oli) hingga gas untuk kebutuhan rumah tangga.

Syarat menjadi mitra Pertamina tidak sulit. Cukup sediakan lahan minimal 4 x 5 meter persegi, masyarakat sudah bisa membuka SPBU mini Pertashop dengan beragam keuntungan, yaitu menjadi agen resmi penyalur produk Pertamina dan tentu saja mendapat harga yang lebih murah dari SPBU konvensional dan pengecer.

Selain itu, ada 3 skema bisnis yang bisa dipilih, yaitu Silver dengan kapasitas 1.000 liter, Gold dengan kapasitas 3.000 liter dan Platinum dengan kapasitas 5.000 liter. Semuanya bisa diatur sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Pertamina memang sedang gencarnya mendirikan Pertashop di daerah pedesaan. Selama ini, masyarakat pedesaan masih mengalami kesulitan akses BBM, apalagi bagi pelaku usaha pedesaan seperti petani, nelayan, pengusaha bengkel hingga industri rumahan.

Diharapkan dengan banyaknya Pertashop, perkembangan ekonomi pedesaan akan meningkat dan penyaluran bahan bakar bisa merata. Tahun ini, Pertamina menargetkan akan mendirikan 10.000 Pertashop di seluruh Indonesia.

Dari pihak swasta, ExxonMobil Indonesia juga terus mengembangkan bisnis hilirnya lewat pengembangan proyek SPBU mini di area Banten dan Jawa Barat serta sejumlah proyek hilir lainnya.

Adapun bisnis hilir ini merupakan kerjasama antara ExxonMobil dan PT Indomobil Prima Energi. Meski baru pilot project, selain fasilitas pengisian bahan bakar, SPBU mini ExxonMobil juga dilengkapi dengan toko sparepart. Langkah pengembangan bisnis ini, menurut Erwin, merupakan langkah ExxonMobil dalam mendukung upaya Pemerintah menjaga ketersediaan energi.

Pemerintah pun sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur. ★





Konsisten Tekan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Titik penyaluran BBM 1 Harga terus bertambah. Artinya, makin banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menikmati harga BBM yang sama dengan di kota-kota besar. Meski jumlah titik BBM 1 Harga terus bertambah, penyelewengan BBM bersubsidi terus terjadi.

BPH Migas tentu tidak bisa bekerja sendiri karena ada banyak faktor yang membutuhkan eksistensi institusi lainnya khususnya dalam hal pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan agar penyaluran BBM 1 Harga tepat sasaran. Hal ini tak terlepas dari tujuan menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan 1 Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Secara Nasional.

Potensi penyelewengan sangat besar

Dalam hal pengawasan, salah satu langkah yang dilakukan BPH Migas adalah membangun kerja sama dengan Markas Besar Polri untuk menyukseskan program BBM 1 Harga dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU).

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengakui, potensi penyelewengan tersebut sangat besar.

"Ketika dari depot masuk ke SPBU, itu banyak peluang penyimpangan. Apakah itu melalui kapal, mobil tangki, dan sebagainya," ujarnya belum lama ini.

Sementara itu, ia meneruskan, BPH Migas punya keterbatasan SDM dan itu pun hanya ada di Pusat. "Jadi, kami sangat membutuhkan bantuan, khususnya dari kawan-kawan Kepolisian yang memiliki personel hingga di daerah-daerah. Baik di desa-desa, kecamatan, dan seterusnya," sambungnya.

Sinergi dan koordinasi lintas instansi ini tentu diperlukan guna menekan terjadinya praktik penyalahgunaan BBM

bersubsidi. Hal ini karena sumber daya manusia di BPH Migas masih terbatas. Pengawasan dari Polri dibutuhkan untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan tidak diselewangkan. Berbagai hal yang menjadi kesepakatan antara BPH Migas dengan kepolisian, meliputi tukar menukar data dan informasi, pengawasan, pemberian kesadaran hukum, pengamanan penegakkan hukum, hingga peningkatan kapasitas serta kualitas SDM.

Memanfaatkan teknologi digital

BPH Migas mencatat, sejak 2016 hingga Maret 2019, ditemukan penyelewengan penggunaan BBM sebesar 6,4 juta liter atau bisa disebut menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp72,6 miliar. "Rata-rata BBM yang disalahgunakan dari BBM Subsidi dijual di atas harga subsidi," jelas kata Menteri ESDM Igantius Jonan.

Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya jenis solar yang banyak dikonsumsi. "Yang penting ini adalah pengawasan mengenai solar. Karena industri juga menggunakan solar yang sama pada umumnya dengan kendaraan bermotor," katanya.

Jonan pun memerintahkan kepada Kepala BPH Migas untuk memanfaatkan perjanjian kerja sama dengan Polri untuk implementasi penertiban penggunaan solar, baik dari sisi pihak penyalur dan pengguna sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. "Saya minta (BPH Migas) ini supaya dijalankan," ujarnya.

Banyaknya potensi penyimpangan dalam distribusi BBM menjadi tantangan berat bagi BPH Migas dalam menjalankan tugasnya. BPH Migas juga melakukan langkah inovatif dengan pemanfaatan teknologi dalam menekan angka penyelewengan.

Bersama *stakeholder* lainnya, BPH Migas telah menguji coba penyaluran BBM di SPBU dengan teknologi digital. Perangkat tersebut dipasang mulai dari tangki penyimpanan BBM di SPBU sampai kran penyaluran BBM (*nozzle*) di dispenser. Dengan teknologi ini, data penyaluran BBM bersubsidi dan non subsidi akan lebih akurat. Selain itu, pembayaran subsidi Pemerintah ke Badan Usaha akan lebih tepat seiring dengan keakuratan data penyaluran BBM bersubsidi.

Kedua, badan usaha wajib melaporkan volume penjualan termasuk data stok,

losses, dan penggunaan sendiri (*own use*). "Langkah ini terkait dengan digitalisasi. Kalau digitalisasi tidak bisa, saya kira laporan penjualan ini akurasi tidak bisa pas 100%," Jonan menambahkan. Ketiga, menyiapkan SOP untuk melakukan verifikasi pengecekan sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya adanya sosialisasi yang dilakukan secara masif bersama Komisi VII DPR RI dan Polri.

Langkah terakhir adalah pengawasan akan dilakukan secara rutin dan insidental terhadap penyaluran dan pendistribusian BBM dengan melibatkan penegak hukum. Adapun kuota JBT tahun 2019 adalah solar sebanyak 14,5 juta kilo liter (kl) dan 610 ribu kl untuk kerosene (minyak tanah). Apabila tidak dilakukan pengawasan pendistribusian BBM yang baik, maka pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan terjadi potensi kelebihan kuota solar.

Terkait tuding disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi sebagai celah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi, memang masih menjadi tantangan besar untuk segera dicarikan solusi. Misalnya, disparitas harga antara solar bersubsidi dan non subsidi yang masih jelas terlihat, yakni bisa mencapai Rp5.000 per liter. Solar bersubsidi digunakan



untuk angkutan umum dan mobil pribadi. Sedangkan, non subsidi digunakan industri, seperti perkebunan dan pertambangan.

Berimplikasi terhadap kelangkaan

Penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa berdampak luas, seperti terjadinya kelangkaan. Hal ini, misalnya diguga terjadi di Bengkulu belum lama ini. Sinyalmen tersebut tidak lepas dari perhitungan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

"Saya sudah menghitung BBM jenis solar yang seharusnya kuota yang dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Di mana pehari sebanyak 224 Kiloliter (KL), jika benar *real* perhitungannya dalam satu bulan bisa diketahui berapa banyak yang sudah dialokasikan," ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Dijelaskan, apabila pendistribusian dengan normal dan tidak ada indikasi penyelewengan dengan pihak yang mendapatkan benar-benar layak atau tepat sasaran, kuota yang ada dipastikan bisa mencukupi kebutuhan.

"Dari kalkulasi demikian, besar kemungkinan indikasi penyimpangan dalam penyaluran memang terjadi," kata Rohidin.

Ditegaskan Rohidin, dengan adanya indikasi demikian, diminta Tim Pengawas Penyaluran yang sudah terbentuk, dapat terus mengawasi penyaluran BBM solar ataupun premium yang juga disubsidi secara berkesinambungan.

"Kemudian diharapkan aparat penegak hukum juga dapat turut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ini," harapnya.

Lebih jauh Gubernur Bengkulu menambahkan, dengan waktu yang tinggal 5 bulan lebihmenjelang akhir tahun, sisa kuota 40 persen dari total yang diberikan, diyakini bisa mencukupi. Tetapi dengan catatan, dalam pendistribusiannya nanti berjalan normal atau tepat sasaran.

"Jika terjadi penyimpangan, seperti dijual pada perusahaan atau sektor industri, dan oknum yang melakukan penimbunan, berapapun kuota yang diberikan tidak bakal mencukupi," ucapnya.



Kendati demikian ia juga mengharapkan partisipasi masyarakat umum untuk pro aktif melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi dalam wilayah Bengkulu ini, baik jenis solar ataupun premium. Mengingat dengan kelangkaannya ini, semua terkena dampaknya.

"Seiring dengan itu, sebagai solusi kita tetap meminta tambahan kuota dengan BPH Migas, yang rencananya bakal melakukan pertemuan terlebih dahulu awal bulan depan," ungkapnya.

Area perairan

Memang, Pemerintah mengurangi jumlah kuota BBM Solar Subsidi dari 15,5 juta KL tahun lalu menjadi 14,5 juta KL tahun

ini. Pengurangan jumlah kuota BBM Solar Subsidi ini salah satu tujuannya mengurangi terjadinya penyalahgunaan. Apalagi banyak kasus penyalahgunaan BBM Solar Subsidi ini, termasuk BBM Solar Subsidi untuk Angkutan Marine atau pelayaran.

"Pengawasan terhadap angkutan BBM marines bersubsidi perlu diperketat. Jika BBM marines bersubsidi ini diselewangkan artinya dijual kepada pengguna yang tidak berhak maka negara berpotensi dirugikan," ujar Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan di Jakarta belum lama ini.

Saat ini, selisih harga antara BBM *marines* subsidi dengan non subsidi memiliki rentang yang sangat besar sekitar Rp4.000/liter. "Bayangkan, dengan selisih harga yang cukup besar tersebut potensi penyalahgunaan sangat mungkin sekali dilakukan oknum-oknum yang memang ingin mencari rente," lanjut Mamit.

Kerawanan penyelewengan BBM *marines* bersubsidi terjadi pada saat *loading* (pengisian) dari kapal /bunker ke kapal penerima atau juga dari kapal pengguna BBM marines subsidi dialirkan kembali ke kapal milik penadah. "Harusnya ketika dilakukan proses *loading* ke kapal pengguna bbm subsidi, dilakukan pengawasan yang ketat oleh petugas dari BPH Migas, pihak kepolisian serta TNI AL sehingga bisa meminimalkan penyalahgunaan" pungkas Mamit Setiawan.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria menilai, jika BBM *marines* diselewangkan maka jumlahnya bisa sangat besar. "Isi BBM pada satu kapal pelayaran dalam negeri minimal bisa 200 KL. Jika diselewangkan rata-rata sebanyak 20 persen saja setiap *loading* itu berarti banyak menggerogoti subsidi negara dan merugikan perusahaan pelayaran," tegasnya.

Dia menambahkan, karena BBM bersubsidi terkait kewenangan BPH Migas, maka BPH Migas perlu lakukan pengawasan melekat terhadap penyaluran BBM marines subsidi. BPH Migas harus sering lakukan sidak tanpa melibatkan perusahaan pengguna BBM marines bersubsidi agar sidaknya berhasil. ★

Sinergitas Menjaga Mutu BBM

Menurut pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beberapa kota besar di Indonesia memiliki kualitas udara yang sudah melampaui ambang batas baku mutu udara yang sehat. Jakarta misalnya, Per Januari 2017–Januari 2018, kualitas udaranya mencapai 35 ug/m³, sudah melampaui standar WHO 25 ug/m³. Penyebab utamanya adalah gas buang kendaraan bermotor dengan mesin yang menggunakan BBM berkualitas rendah.



Terkait hal ini, BPH Migas menggandeng Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) "LEMIGAS" melakukan kegiatan pemeriksaan mutu BBM hasil investigasi atau pengawasan BPH Migas. Hal ini perlu dilakukan guna meminimalisir dampak buruk mutu buruk BBM bagi masyarakat luas.

Sejumlah kajian juga akan dilaksanakan di antaranya kajian alokasi BBM subsidi, kajian kebutuhan infrastruktur pendistribusian BBM, kajian pengawasan distribusi avtur serta kajian sub penyalur.

Memiliki sarana laboratorium yang lengkap dan tenaga ahli

Direktur Bahan Bakar Minyak, BPH Migas, Alfon Simanjuntak menyampaikan BPH

Migas berperan penting dalam pengawasan pendistribusian BBM agar memenuhi spesifikasi BBM yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

"Monitoring dan pengawasan BBM tersebut sangat penting, mengingat konsumen akan semakin teliti dalam membeli bahan bakar yang diperlukan, terutama konsumen kalangan industri dan perusahaan pembangkit listrik," kata Alfon saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemimpin BLU "LEMIGAS" Setyorini Tri Hutami di gedung BPH Migas Jakarta, Jumat (21/6).

"BLU 'LEMIGAS' siap mendukung BPH Migas dalam melaksanakan pengawasan pendistribusian BBM, karena telah memiliki sarana laboratorium yang lengkap dan tenaga ahli," kata Setyorini.

Setyorini berharap kegiatan penelitian ini akan memperoleh data aktual atas kualitas bahan bakar yang didukung oleh laboratorium uji yang kompeten menganalisa kualitas BBM. Pengujian mutu BBM menggunakan sejumlah pengujian dan sarana laboratorium.

Untuk pengujian bensin, solar, maupun biodiesel akan memanfaatkan Laboratorium Bahan Bakar Non-Penerbangan. Sementara itu, mesin Coordination Fuel Research (CFR) dipergunakan untuk menentukan angka oktan bahan bakar, dengan membandingkan bahan bakar tertentu dengan bahan bakar standar.

"Masih ada beberapa pengujian yang dilakukan BLU "LEMIGAS", antara lain uji parameter fisika kimia bahan bakar minyak dan uji spesifikasi bahan bakar avtur, avgas, kerosin/minyak tanah, bensin (RON 88, 91,

95), solar (48, 51), minyak bakar, biofuel, dan biodiesel,” ungkap Setyorini.

Khusus kajian pengawasan distribusi avtur, kata Setyorini, BLU “LEMIGAS” dilengkapi dengan uji spesifikasi bahan bakar dan Laboratorium Bahan Bakar Penerbangan, yang mampu menguji beberapa parameter, seperti freezing point, thermal stability, viskositas, micro-separometer dan beberapa parameter lainnya.

Penandatanganan kerjasama BLU “LEMIGAS” dan BPH Migas mencakup beberapa lingkup rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019, kerjasama difokuskan kepada pengawasan hasil investigasi BPH Migas dalam melakukan pengujian mutu oleh BLU “LEMIGAS”.

Kerjasama antara BPH Migas dan BLU “LEMIGAS” merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman terkait Penelitian, Pengembangan, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa di Jakarta pada 16 April 2019. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan kinerja kedua belah pihak, bagi BPH Migas dalam hal pengawasan dan pengangkutan usaha hilir migas, sedangkan bagi Badan Litbang ESDM dalam hal peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Diharapkan kemampuan BLU Badan Litbang ESDM, terutama dalam pengawasan pelaksanaan investasi (distribusi BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa), efisiensi energi, dan transformasi penyediaan energi bersih dan berkelanjutan dapat meningkatkan nilai tambah bagi BPH Migas,” jelas Dadan Kusdiana di Jakarta, Kamis (18/4).

Dadan menambahkan, BLU LEMIGAS telah memiliki kemampuan yang teruji di kegiatan hilir migas. Hal ini ditandai dengan sejumlah kepemilikan sertifikat untuk keselamatan kerja (OHSAS 18001), manajemen lingkungan (ISO 14001), manajemen sistem (ISO/IEC 9001), dan standar kompetensi laboratorium (SNI ISO/IEC 17025).

Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyambut baik jalinan kerjasama ini sebagai bagian dari upaya Pemerintah menata investasi migas terhadap wilayah jaringan distribusi BBM dan gas bumi.

“BPH Migas akan melelang sejumlah wilayah jaringan distribusi BBM dan telah banyak investor yang berminat terhadap wilayah jaringan distribusi tersebut. Kami berharap BLU LEMIGAS dapat mengkaji dan mengevaluasi penawaran dari investor agar diperoleh penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelas Fanshurullah.

Selain itu, beberapa peluang kerjasama yang akan dikembangkan antarunit Kementerian ESDM tersebut antara lain, Kajian teknis kelayakan perubahan toll fee jaringan pipa transmisi atau distribusi existing, monitoring dan evaluasi mutu gas bumi di jaringan pipa transmisi dan distribusi, konsultan pengawasan pelaksanaan investasi, pengujian laboratorium untuk BBM dan gas bumi, inspeksi pipa gas bawah laut, dan manajemen energi di Gedung BPH Migas.

“Saat ini, BPH Migas telah mengidentifikasi sebanyak 1.583 lokasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum memiliki SPBU. BLU LEMIGAS diharapkan dapat melakukan kajian akademis terhadap ketersediaan dan kebutuhan BBM di setiap lokasi,” harap Fanshurullah.

Baik Dadan maupun Fanshurullah berharap, Nota Kesepahaman ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja baik Badan Litbang ESDM maupun BPH Migas.

Aturan main standar mutu

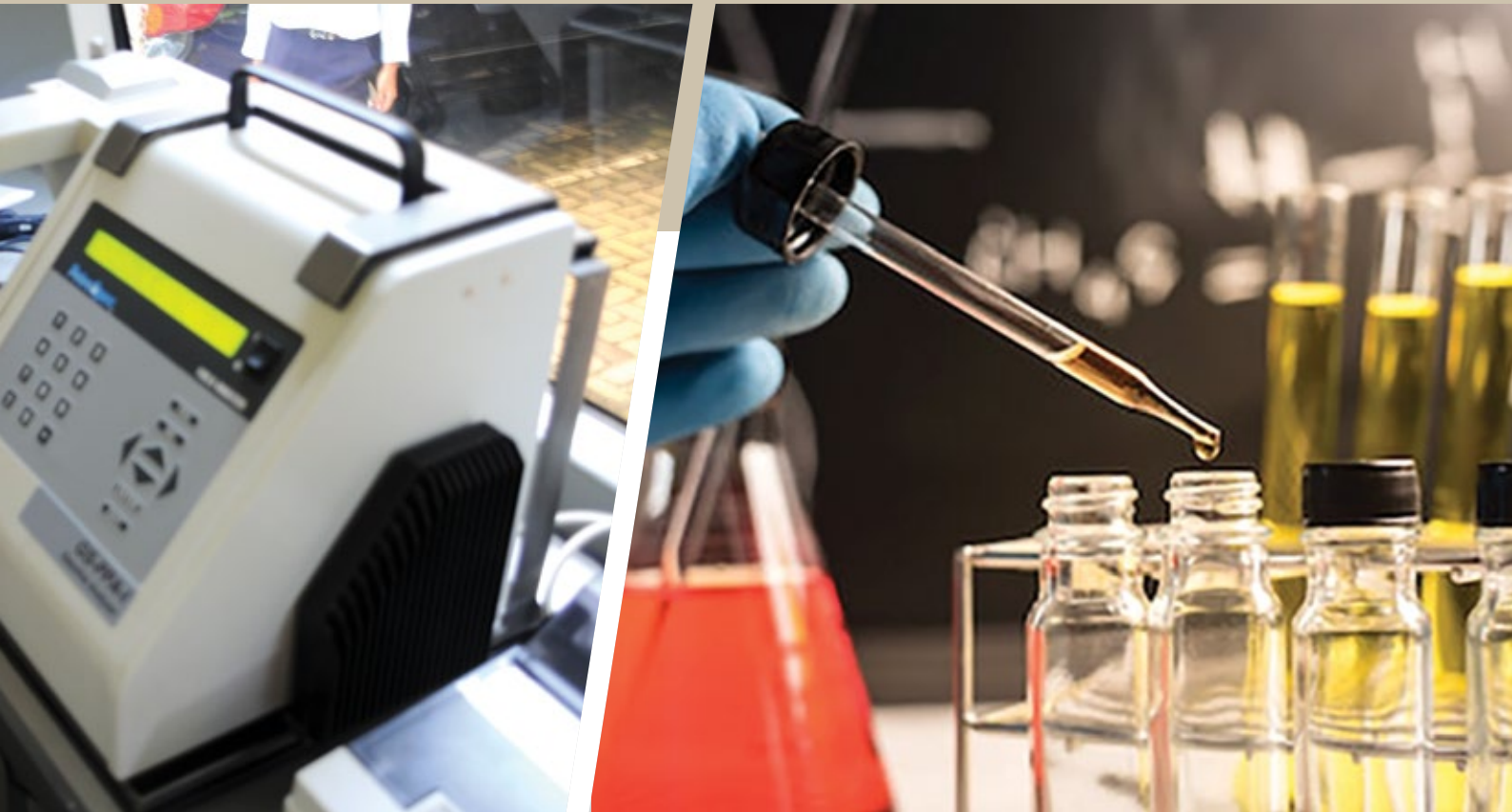
Terkait penyediaan BBM berkualitas, Pertamina terus menjalankan berbagai program modernisasi kilang (Refinery Development Masterplan Program/RDMP) dan pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR). Dengan program ini, dalam lima hingga tujuh tahun ke depan, Pertamina menargetkan bisa memproduksi BBM berkualitas dan ramah lingkungan standar Euro-5. Saat ini, sejumlah kilang Pertamina antara lain di



Balikipapan, Balongan dan Cilacap, telah disiapkan untuk menghasilkan produk BBM berkualitas tinggi seperti Pertamina Dex, Pertamina Turbo.

Pertamax series yang diproduksi Pertamina memiliki tiga keunggulan yaitu detergensi, yang berfungsi untuk membersihkan deposit sulfur yang berada di dalam mesin, demulsifier yang bersifat untuk menghindari kandungan air dalam BBM dan yang ketiga adalah corrosion inhibitor yaitu untuk mencegah karat pada mesin. Dengan keunggulan tersebut, mesin menjadi lebih bersih dan umur kendaraan menjadi lebih awet. Kedua, anti knocking karena suara mesin lebih halus. Dan ketiga Pembakaran menjadi lebih sempurna sehingga konsumsi BBM bisa lebih irit.

Sejak tahun lalu, Kementerian ESDM telah mengeluarkan aturan main tentang standar mutu atau spesifikasi BBM dengan Research Octane Number (RON) 98. Dengan begitu, setiap Badan Usaha yang ingin berjualan BBM RON 98 yang berstandar Euro 4 harus bisa memenuhi syarat yang diatur oleh Pemerintah. Penetapan standar dan mutu BBM RON 98 untuk menjawab kebutuhan konsumen agar tersedianya BBM dengan kadar sulfur rendah, setara dengan Euro 4, yaitu di bawah 50 ppm.



Sesuai Euro 4, negara-negara Eropa merupakan kiblat awal penetapan spesifikasi BBM yang lebih memperhatikan faktor yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, seperti sulfur. Eropa sendiri sudah lebih dulu maju hingga sudah menerapkan standar Euro 5. Hanya di negara-negara Asia umumnya sudah menetapkan standar setara Euro 4. Indonesia sendiri terbilang cukup tertinggal dalam penerapan standar setara Euro 4 dibanding dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu, spesifikasi RON 98 diterapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0177.K/10/DJM.T/2018 tentang standar dan mutu BBM jenis bensin RON 98 yang dipasarkan di dalam negeri. Dalam pertimbangannya, Dirjen Migas menyatakan untuk mendapatkan kepastian mutu bahan bakar minyak di dalam negeri dengan memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, perlu menyusun spesifikasi BBM jenis bensin (gasoline) RON 98 yang dipasarkan di dalam negeri.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor

0048 Tahun 2005 tentang standar dan mutu, serta pengawasan BBM, BBG, bahan bakar lain, LPG, LNG dan hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri, Dirjen Migas menetapkan standar dan mutu BBM yang dipasarkan di dalam negeri.

Aturan tersebut menyatakan, Dirjen Migas menetapkan standar dan mutu BBM jenis bensin (gasoline) RON 98 dengan standar dan mutu (spesifikasi) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Dirjen tersebut. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni sejak 6 Juni 2018.

Beberapa poin utama yang diatur dalam beleid:

1. Penetapan 0,005% m/m untuk kandungan ulfur setara dengan 50 ppm.
2. Batasan 0,002% m/m untuk sulfur merkaptan setara dengan 20 ppm.
3. Tidak ada penambahan sengaja aditif berbasis logam atau aditif yang dapat membentuk abu (ash forming).
4. Jika digunakan oksigenat jenis either lebih disukai, kandungan Bioetanol mengacu pada Permen ESDM 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain

sebagaimana telah dua terakhir dengan Permen ESDM 12 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM no 32 Tahun 2008, alkohol berkarbon lebih tinggi (C>2) dibatasi maksimal 0.1% volume. Penggunaan methanol tidak diperbolehkan.

5. Apabila mengandung olefin diatas 20%, hasil pengujian angka stabilitas oksidasi minimum 1.000 menit.
6. Untuk produksi dari kilang dalam negeri angka aromatik diizinkan hingga maksimum 50% sampai akhir tahun 2024.

Sejak tahun lalu pula, BPH Migas menerapkan Kebijakan Sistem Manajemen Integrasi Mutu, Lingkungan dan K3 sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan dan pendistribusian Migas di NKRI sesuai dengan amanat Undang-Undang.

BPH Migas akan menerapkan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, sebagai langkah konkret untuk melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan, pengawasan dan pendistribusian kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia. ★

Kelangkaan BBM di Tol Trans Sumatera, Kepala BPH Migas Pantau Langsung ke Lapangan

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim Siaga Mudik PT Pertamina (Persero) meninjau langsung SPBU di Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Bakauheni-Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang, Sabtu (01/06/19). Peninjauan ini merupakan aksi cepat tanggap (quick response) atas terjadinya kelangkaan BBM jenis Premium dan Pertamax di Tol Trans Sumatera.

Sebelumnya, Jumat (31/05/19), Kepala BPH Migas telah meminta Pertamina untuk menambah pasokan ketersediaan BBM Gasoline baik itu jenis Premium, Peralite, dan Pertamax di jalur tol operasional dan fungsional Tol Trans Sumatera, terutama di Km 234 arah Palembang, menyiapkan mobil dispenser dan kantong BBM di 15 titik Rest Area lokasi penjualan BBM yang ada (bukan hanya kios Pertamina) di Tol Bakauheni-Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang serta menambah armada motoris di jalur Tol Sumatera dan non tol, terutama daerah Mesuji dan Tulang Bawang.

Sebagai tindak lanjut tersebut, Pertamina telah menempatkan SPBU kantong atau stand by mobil kantong Pertamina 16 KL di Rest Area Km 163, Km 208, Km 234, dan Km 285 serta menyediakan Premium kemasan 5 liter di Km 87 dan Km 234 untuk masyarakat yang memerlukan BBM jenis Premium.

Berdasarkan pantauan di Rest Area Km 33, Km 87, Km 163, Km 208, Km 208, Km 234, Km 285, dan Km 347 Kayu Agung, Sabtu (1/6/19) diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan pengiriman BBM di Rest Area Km 33 hampir 4 Jam.
2. Di dalam Rest Area Km 208, terdapat pengecer BBM Premium dengan harga Rp11 ribu per liter. Hal ini dikarenakan keterlambatan suplai BBM.
3. Terjadi antrean BBM sekitar 200 m dengan waktu tunggu sekitar 1 jam.
4. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemudik dan mengurangi waktu antrean, Kepala BPH Migas meminta untuk ditambah dispenser/nozzle di SPBU yang terjadi antrean, seperti di Rest Area Km 208 dan meminta aparat kepolisian untuk mengimbau pemudik mengisi BBM di rest area berikutnya



atau di Km 215 dan Km 234. Kepala BPH Migas juga mengimbau masyarakat yang mudik dapat mengisi BBM sebelum memasuki tol operasional dan fungsional mengingat beberapa penggunaan masih dalam tahap uji coba.

Apabila masyarakat mengalami kendala dalam memperoleh BBM, Kepala BPH Migas mengimbau agar disampaikan ke Posko Nasional sektor ESDM yang bermarkas di Gedung BPH Migas, Jl. Kapten P. Tendean

No. 28 Jakarta Selatan dengan Nomor Kontak Pengaduan Masyarakat:

1. Call Center ESDM (136)
2. Posko BPH Migas (021-5276709).
3. Call Center PT. Pertamina (Persero) di (135).
4. Call Center PT. AKR Corporindo, Tbk di (021-531110).
5. Call Center PT. PLN ((kode area) 123).
6. Call Center PT. PGN di (1-500-645).
7. Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (022-7272606). ★





Kunjungan Kerja Kepala BPH Migas ke Sejumlah Infrastruktur penyediaan BBM di Karawang, Purwakarta, Cikampek, dan Bandung

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja ke sejumlah infrastruktur penyediaan BBM di Karawang, Purwakarta, Cikampek, dan Bandung pada 25-27 Mei 2019. Kunjungan kerja ini dalam rangka memastikan ketersediaan dan kelancaran penyediaan BBM menjelang mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPH Migas mengunjungi:

1. Terminal BBM Cikampek
2. Terminal BBM Padalarang Group
3. SPBU di Rest Area Tol Cipali Km 102
4. SPBU Shell di Pasteur Bandung
5. Satgas Badan Geologi di Bandung
6. Mini SPBU Exxon di Purwakarta
7. SPBU APR (BP-AKR)

Secara umum, ketersediaan BBM menghadapi hari raya Idul Fitri dalam kondisi aman. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019. Dalam rangka mengamankan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, listrik, dan antisipasi kebencanaan

geologi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019, telah dibentuk Tim Posko Nasional Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM No 81K/73/MEM/2019 tanggal 13 Mei 2019 dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM ditunjuk sebagai Ketua/ Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM dan Kepala BPH Migas sebagai Wakil Ketua.

Posko Nasional sektor ESDM melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas Polri, Badan Usaha di bidang penyediaan BBM, gas, dan listrik, yaitu PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT PLN (Persero), PT PGN (Persero), PT Pertagas Niaga, PT Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT Vivo

Energy Indonesia, PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, dan PT Aneka Petroindo Raya.

Dengan dibentuknya Posko Nasional, diharapkan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah NKRI untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 serta mengisi libur Lebaran. Selain itu, apabila terjadi kelangkaan dan gangguan penyediaan dan pendistribusian BBM, gas, listrik dan bencana geologi (letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah) dapat direspon dan diatasi dengan cepat sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 dengan aman, tenang dan khidmat. ★

Kunjungan Kerja ke PLN Rayon Ampera



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengadakan kunjungan kerja ke Kantor APD (Area Pengatur Distribusi) PLN Rayon Ampera. Kunjungan ini dalam rangka pemantauan kesiapan Posko

sektor ESDM menjelang hari raya Idul Fitri 1440 H/2019.

Dalam kunjungan ini, Kepala BPH Migas didampingi Kasubdit Pengawasan BBM

BPH Migas Idham Baridwan bersama Itjen Kementerian ESDM. Kunjungan tersebut mencakup Rapat Koordinasi dan Peninjauan Warroom/Control Room di Kantor APD PLN Rayon Ampera. ★

Kepala BPH Migas Pantau Ketersediaan Gas LPG Jelang Hari Raya Idul Fitri di Palembang



Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa meninjau Depot LPG Pulau Layang, Kamis (30/5/19). Peninjauan ini dalam rangka pemantauan ketersediaan gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019.

Dalam kunjungan ini, Kepala BPH Migas didampingi Kasubdit Pengawasan BBM BPH Migas Idham Baridwan bersama Itjen Kementerian ESDM. Pada kegiatan ini, rombongan melakukan monitoring ketersediaan BBM di Depot LPG Pulau Layang untuk memastikan layanan terkendali. ★

Tim Posko ESDM Meninjau Kesiapan BBM di Wilayah Bandung dan Sekitarnya

Tim Posko ESDM yang dipimpin oleh Komite BPH Migas Jugi Prajogio beserta dengan Tenaga Ahli Menteri ESDM, Faisal Rahadian, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Yose Rizal dan Jarot Pranggono serta Tim BPH Migas, Firdaus dan Bagja melakukan peninjauan langsung di TBBM Ujungberung dan beberapa SPBU di Wilayah Bandung dan sekitarnya. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM guna menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H/ Tahun 2019. Dalam kunjungan tersebut, diketahui stok dan pendistribusian BBM di wilayah Bandung dan sekitarnya dalam kondisi aman.

Terminal BBM Ujungberung mendapatkan suplai dari RU Cilacap melalui pipa sejauh 160 Km. Terminal BBM ini melayani 208 SPBU di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Data ketersediaan Stok TBBM Ujungberung:

Pertamax : Rata-rata CD 13.3
Premium : Rata-rata CD 7
Solar : Rata-rata CD 13

Tim berangkat ke SPBU 34.40232 di Rest Area Km 147 Tol Purbaleunyi

Data lapangan

- **Data Sarfas :**

1. Premium : 2 Nozzle, 1 dispenser
2. Peralite : 4 Nozzle 2 Dispenser
3. Pertamax : 2 Nozzle 1 Dispenser
4. Pertamax Turbo : 2 Nozzle, 1 Dispenser
5. Solar : 4 Nozzle 2 Dispenser
6. Dexlite : 2 Nozzle 1 Dispenser

- **Tangki Timbun :**

1. Premium : 1 x 30 KL
2. Peralite : 1 x 45 KL
3. Pertamax : 1 x 20 KL
4. Pertamax Turbo : 1 x 20 KL
5. Solar : 1 x 45 KL
6. Dexlite : 1 x 30 KL

Kondisi lapangan Ruas Tol Purbaleunyi mayoritas Lancar, masih belum ada penumpukan kendaraan di ruas tol ini. SPBU KM 147 merupakan SPBU terakhir dari arah Jakarta sebelum keluar di GT Cileunyi. Di lokasi Rest Area km 147 sudah terdapat beberapa tenda posko milik Polres, Bank Indonesia dan Beberapa gerai produk minuman.

Setelah itu, tim bergerak ke SPBU 34.453.01 di Cipacing.

Data lapangan

- **Data Sarfas :**

1. Premium : 1 Nozzle, 1 dispenser
2. Peralite : 2 Nozzle 1 Dispenser
3. Pertamax : 2 Nozzle 1 Dispenser
4. Solar : 2 Nozzle 1 Dispenser
5. Dexlite : 1 Nozzle 1 Dispenser

- **Tangki Timbun :**

1. Premium : 1 x 15 KL
2. Peralite : 1 x 15 KL
3. Pertamax : 1 x 15 KL
4. Solar : 1 x 15 KL
5. Dexlite : 1 x 3 KL

SPBU 34.453.01 berdiri pada tahun 1991 yang merupakan SPBU pertama bagi para pengendara yang akan menuju Garut, Tasik dan sebagainya yang diharapkan menjadi garda terdepan untuk memberikan bahan bakar kepada para pengendara yang hendak menuju Garut, Tasik dan sebagainya.

Terakhir, tim mengunjungi SPBU 34.403.29 di Cicalengka

Data lapangan

- **Data Sarfas :**

1. 4 dispenser yang masing-masing 4 nozzle
2. Premium : 5 Nozzle, 3 dispenser
3. Peralite : 5 Nozzle 3 Dispenser
4. Pertamax : 8 Nozzle 4 Dispenser
5. Solar : 3 Nozzle 2 Dispenser
6. Pertamina Dex : 2 Nozzle 1 Dispenser

- **Tangki Timbun :**

1. Premium : 1 x 31 KL
2. Peralite : 1 x 31 KL
3. Pertamax : 1 x 19 KL
4. Solar : 1 x 45 KL
5. Pertamina Dex : 1 x 5 KL

Dalam menjamin keamanan dalam pengelolaan SPBU, pihak pengelola SPBU mendapat bantuan personel pengamanan dari PM Pusdikpom Cimahi.

Informasi tambahan :

- SPBU buka selama 24 jam
- Rest area terdapat gerai makanan atm, toilet, mushola. ★



Kepala BPH Migas Mendampingi Wamen ESDM Tinjau Terminal BBM Plumpang

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa turut mendampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam peninjauan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang, Jakarta, pada Selasa (28/5). Kunjungan ini dalam rangka memastikan kesiapan sektor ESDM dan geologi selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2019 berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemantauan yang juga diikuti oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, Dirjen Kenagalistrikan Rida Mulyana, Kepala Badan Geologi Rudi Suhendar, dan Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid, pasokan dan distribusi BBM dalam kondisi aman.

Pemerintah menempatkan prioritas tertinggi untuk melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat. Khususnya menghadapi tingginya mobilitas pada hari besar keagamaan dan libur umum, Pemerintah akan meningkatkan pelayanan.

Pada masa mudik lebaran tahun 2019 diperkirakan pasokan BBM aman. Prediksi rata-rata ketahanan stok nasional BBM rata-

rata minimal 21 hari, seperti Premium (21 hari), Peralite (21 hari), Pertamina (22 hari), Biosolar (26 hari), Dexlite (27 hari), dan Dex (35 hari), sedangkan untuk Avtur mencapai 48 hari.

Khusus Terminal BBM Plumpang, rata-rata harian penyaluran untuk konsumen SPBU pada saat hari normal mencapai 15.361 Kilo Liter (KL) dan pada masa mudik kali ini (H-7 dan H+7) hanya mencapai 13.572 KL dengan puncak penyaluran (H-6) diperkirakan mencapai 20.378 KL (penambahan dari peralihan TBBM Cikampek dampak kebijakan one way).

Terminal BBM Plumpang, dengan kapasitas total tangki 322.255 KL. TBBM ini melayani sekitar 791 SPBU, memiliki 24 tangki

penimbunan dengan rincian 7 tangki untuk jenis Premium (kapasitas total 117.385 KL); 5 tangki untuk jenis Solar (kapasitas total 68.641 KL); 7 tangki untuk jenis Pertamina (kapasitas 93.078 KL); 2 tangki untuk jenis Pertamina Turbo (kapasitas 11.106 KL); 1 tangki Pertamina Dex (kapasitas 9.461 KL); 2 tangki untuk jenis FAME (kapasitas 21.563 KL).

TBBM Plumpang dinilai sebagai terminal BBM terpenting di Indonesia karena Plumpang menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina.

Sementara itu, prognosa Stok LPG Nasional Untuk periode Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M perkiraan ketahanan stok rata-rata 385.026 MT (19 hari). Penerimaan BBM di TBBM Plumpang berasal dari Terminal BBM Balongan melalui sarana perpipaan (*pipeline*) dan melalui Dermaga atau *Jetty* yang berada Terminal BBM Tanjung Priok.

Saat ini, untuk menjaga keamanan pasokan BBM dan LPG, Pemerintah membentuk Posko Satgas BBM dan LPG di Kantor Pusat dan seluruh Kantor MOR (Marketing & Operation Region) Pertamina, monitoring stok BBM di seluruh Terminal BBM melalui sistem komputerisasi SIMSND (Sistem Informasi Manajemen Supply & Distribution), menambah armada mobil tanki dan waktu operasional TBBM (jika diperlukan).

Pertamina juga menyiapkan 10 SPBU baru di jalan tol Jawa. Rata-rata untuk 20 Km ada 1 SPBU (di Jawa). Selain itu, disiapkan jalur *contraflow* untuk mengantisipasi stagnasi mobilitas mobil tanki Pertamina akibat kemacetan lalu lintas (bekerja sama dengan Polri), penjualan Pertamina dalam Kemasan serta fasilitas pengisian di rest area non SPBU dan menyediakan produk BBK dalam kemasan yaitu Pertamina, Pertamina Plus, Pertamina Dex dalam kemasan di SPBU yang selama ini belum menjual BBK. Keseluruhan posko ini adalah bagian dari Posko Nasional Sektor ESDM, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan





Rida Mulyana dan Wakil Koordinator Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor kelistrikan. Pada saat Idul Fitri secara umum dalam Kondisi Aman, yaitu pada 5 Juni 2019, daya mampu pembangkit diperkirakan sebesar 38.653,47 MW dan beban puncak sebesar 25.727,32 MW sehingga masih terdapat cadangan operasi sebesar

12.926,15 MW. Tanggal 6 Juni 2019, daya mampu pembangkit diperkirakan sebesar 45.234,87 MW dan beban puncak sebesar 26.546,81 MW sehingga masih terdapat cadangan operasi sebesar 18.688,06 MW.

Kondisi kelistrikan sistem Jawa Bali akan berada dalam kondisi normal, sedangkan untuk sistem luar Jawa Bali terdapat beberapa sistem dalam kondisi siaga.

Sementara terkait potensi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Antisipasi yang dilakukan adalah telah disiapkan informasi peta titik rawan gerakan tanah & gempa bumi, status gunungapi serta Satgas Tanggap Darurat. ★

Pantau Ketersediaan BBM, Kepala BPH Migas Kunjungi Terminal BBM Kertapati

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa mengunjungi Terminal BBM Kertapati, Rabu (29/5/2019). Kegiatan ini dalam rangka pemantauan ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019. Dalam kunjungan ini, Kepala BPH Migas didampingi Kasubdit Pengawasan BBM BPH Migas Idham Baridwan bersama Itjen Kementerian ESDM. ★





Mantan Menteri ESDM Isi Achievement Motivation Ke-17

Pada tanggal 28 Mei 2019, BPH Migas menyelenggarakan Achievement Motivation Ke-17 Bersama dengan salah satu figur yang sudah tidak asing lagi di dunia minyak dan gas bumi, yaitu Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D yang bertempat di Aula Gedung BPH Migas Jakarta. Prof. Purnomo Yusgiantoro merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode tahun 2000 hingga tahun 2009 dan sempat pula menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode tahun 2009 hingga tahun 2014 serta pendiri Universitas Pertahanan dan The Purnomo Yusgiantoro Center.

Beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam menciptakan motivasi untuk dapat berprestasi antara lain :

1. Kesadaran diri sendiri
2. Memiliki rasa percaya diri (motivasi intrinsik)
3. Lingkungan sekitar

“Bekerja nyata untuk menghasilkan karya terbaik adalah sebuah pengabdian dan *never stop to learn*,” pesannya kepada para pegawai BPH Migas. ★

BPH Migas Selenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020-2024

BPH Migas menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Tahun 2020-2024 di Aula Lantai Ground Gedung BPH Migas, Jumat (24/5/19). Rapat dibuka oleh Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan dengan narasumber Komite BPH Migas M. Ibnu Fajar. Setelah pemaparan dari narasumber, dilanjutkan diskusi yang dipimpin oleh Komite BPH Migas Hendry Ahmad.



BPH Migas mengundang 109 Bupati pada daerah 3T yang akan diusulkan sebagai lokasi pembangunan penyalur BBM 1 Harga. Dengan rapat koordinasi ini, diharapkan para bupati pada daerah 3T dapat mengusulkan lokasi kecamatan yang akan dibangun penyalur BBM 1 Harga dan berkomitmen mendukung perizinan pembangunan penyalur BBM 1 Harga sehingga pelaksanaan pembangunan BBM 1 Harga dapat berjalan lancar, tidak ada kendala/hambatan, dan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 500 titik penyalur hingga 2024. Rapat Koordinasi ditutup oleh Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjyo. ★

Konferensi PERS Posko Nasional ESDM Guna Hadapi Idul Fitri 1440 H Tahun 2019

BPH Migas menyelenggarakan Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM dalam Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 yang bertempat di Gedung BPH Migas Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Hadir pada kesempatan ini sebagai narasumber antara lain :

1. Kasbani, Kepala PVMBG Badan Geologi
2. Munir Ahmad, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan
3. Sumihar Panjaitan, Komite BPH Migas
4. Patuan Alfon S, Direktur BBM BPH Migas
5. Agus Taufik, Manager PSO Fuel Retail PT Pertamina (Persero)
6. Firman, Marketing Support PT Pertamina (Persero)

Dengan adanya Posko Nasional Sektor ESDM Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 diharapkan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah NKRI untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 serta mengisi libur Lebaran. Selain itu juga



apabila terjadi kelangkaan dan gangguan penyediaan dan pendistribusi BBM, gas, listrik dan bencana geologi (letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah) dapat direspon dan diatasi dengan cepat sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 dengan aman, tenang dan khidmat.

Nomor Kontak Pengaduan Masyarakat:

1. Call Center ESDM (136)

2. Posko BPH Migas (021-5276709).
3. Call Center PT. Pertamina (Persero) di (1-500-000).
4. Call Center PT. AKR Corporindo, Tbk di (021-5311110).
5. Call Center PT. PLN ((kode area) 123).
6. Call Center PT. PGN di (1-500-645).
7. Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (022-7272606). ★

Peninjauan BBM 1 Harga di Sigi

Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak meninjau Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (7/4/2019). Lebih spesifik, Direktur BBM BPH Migas dan rombongan meninjau dan menguji coba Program BBM 1 Harga ke-131 SPBU Kompak No 76.943.03. SPBU tersebut merupakan titik Penyalur BBM 1 Harga ke-131.

Sarfas: Dispenser ada 2

- a) Nozzle Premium ada 4.
- b) Nozzle Solar ada 4.
- c) Nozzle Pertamina Dex dan Peralite, masing-masing 2 nozzle.

Jumlah tangki timbun ada 4, Tangki Timbun Solar 1, Premium 1, rencana untuk Pertamina Dex 1 tangki dan pertalite 1 tangki. Kapasitas masing-masing tangki adalah 10 KL.

Uji Operasional berjalan dengan baik dan akan beroperasi secara penuh setelah izin terakhir keluar sebelum tanggal 16 April 2019. Pengiriman BBM ke titik ini berasal dari Terminal BBM Donggala dan direncanakan sebelum pemilu perizinan sudah selesai semua dan bisa langsung beroperasi. ★



Sembilan Langkah BPH Migas Jaga Kuota BBM JBT Solar

BPH Migas memverifikasi realisasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar sampai Juli sebesar 9,04 juta KL (62%). Diproyeksikan, sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 15,31–15,94 juta KL.



"Artinya, ada potensi *over* kuota sebesar 0,8-1,4 juta KL (5,5–9,6%)," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam keterangannya, Jumat (20/9/2019).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan BPH Migas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, diduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Adapun Edaran pengaturan pembelian JBT Jenis Minyak Solar yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2019 meliputi:

1. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar bagi kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan.
2. Maksimal pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk angkutan barang roda 4 (empat) sebanyak 30 liter/kendaraan/hari, roda 6 (enam) atau lebih sebanyak 60 liter/ kendaraan/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/kendaraan/hari.

3. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI/ Polri, sarana transportasi air milik Pemerintah.
4. Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak Solar untuk mobil tangki BBM, CPO, *dump truck*, *truck trailer*, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen).
5. Dilarang melayani pembelian JBT Jenis Minyak Solar untuk Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha

- Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan Pelayanan Umum tanpa menggunakan Surat Rekomendasi dari Instansi berwenang.
6. PT Pertamina (Persero) perlu mengatur titik lokasi SPBU yang mendistribusikan JBT Jenis Minyak Solar dengan mempertimbangkan sebaran Konsumen Pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.
7. PT Pertamina (Persero) wajib menyediakan BBM Non Subsidi (Pertamina Dex dan Dextrite) untuk mengantisipasi terjadinya antrian di SPBU.
8. Meminta PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran JBT Jenis Minyak Solar. Hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap berlaku.
9. Selanjutnya BPH Migas bersama PT Pertamina (Persero), DPP Hiswana Migas, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah akan mensosialisasikan di setiap *Market Operation Region* (MOR) PT Pertamina (persero) pada bulan September dan Oktober 2019. ★



BPH Migas Tetapkan Harga Jargas Lebih Murah Dibandingkan Harga Pasar LPG

Pembangunan jaringan gas (jargas) untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, di Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo telah diresmikan beberapa waktu lalu. Peresmian jargas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan valve pengaliran gas-in oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas Djoko Siswanto bersama Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan Suharto.



Saat ini, di Kabupaten Probolinggo telah berhasil dibangun pipa dengan panjang total 48.577 meter sedangkan Kabupaten Pasuruan telah berhasil terbangun pipa dengan panjang total 50.742 meter.

Adapun, sumber gas untuk memenuhi kebutuhan jargas tersebut berasal dari Husky CNOOC Madura Ltd. dengan alokasi sebesar 0,4 MMSCFd. Jumlah tersebut dapat melayani untuk kebutuhan 4.000 SR (Sambungan Rumah) di Kabupaten Probolinggo yang meliputi 5 Kelurahan (Kelurahan Mentor, Lemah Kembar, Bayeman, Curah Dringu, dan Kelurahan Tongas Wetan); dan sebanyak 4.000 SR di Kabupaten Pasuruan pada 5 Kelurahan (Kelurahan Karangjati, Petungsari, Jogosari, Pandaan, dan Kelurahan Kutorejo).

“Harga jargas untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan yang baru diresmikan tersebut, saat ini sedang dalam proses penetapan oleh BPH Migas. Namun demikian, agar masyarakat lebih cepat merasakan manfaat gas bumi, pengaliran gas bumi tetap dilakukan,” jelas Sumihar Panjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2019).

Di tempat terpisah, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan BPH Migas akan menetapkan harga jargas tersebut melalui sidang komite. Sebelum ditetapkan dalam sidang Komite telah melalui tahapan survei daya beli masyarakat dan public hearing dengan melibatkan Kementerian ESDM, Pemda Provinsi Kabupaten/Kota, KPPU, Badan Usaha penugasan, Lembaga

Perlindungan Konsumen, dan perwakilan masyarakat serta instansi terkait.

Dalam penetapan harga jual gas, BPH Migas berprinsip mewujudkan keseimbangan antara Badan Usaha dalam memperoleh keuntungan yang wajar dan tetap menjaga keandalan dan keamanan layanan jargas. Masyarakat dan usaha kecil memperoleh harga jargas yang wajar sesuai kemampuan daya beli dan mendukung kepentingan Pemerintah untuk diversifikasi energi dari konsumsi LPG ke jargas. Penggunaan jargas mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan penggunaan LPG tabung selain harga lebih murah, penggunaan jargas lebih aman, kemudahan akses, efisien, ramah lingkungan dan keandalan pasokan gas serta jaminan kualitas layanan.

Pemerintah tengah melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur jargas agar ketersediaan energi dapat diakses oleh masyarakat kecil secara langsung sekaligus mendukung program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar bersubsidi APBN (BBM dan LPG 3 Kg) untuk beralih ke penggunaan alternatif gas bumi untuk sektor rumah tangga dan transportasi.

Keseriusan pemerintah ini telah dituangkan dalam sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) untuk pemenuhan kebutuhan energi final sektor rumah tangga sesuai dengan membangun jaringan gas kota bagi 4,7 juta Sambungan Rumah Tangga (SR) pada tahun 2025.

“Hingga Oktober 2019, BPH Migas telah menetapkan harga Jargas di 45 Kabupaten/ Kota dengan harga jual di bawah harga pasar gas LPG 3 Kg dan 12 Kg sebagai komitmen untuk mewujudkan keadilan energi untuk masyarakat,” tegas Ifan. ★

Bulan Oktober, Program BBM 1 Harga Rampung

Program yang digagas Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016 berupa BBM 1 Harga di pelosok nusantara akan tuntas bulan Oktober ini. Pemerintah kini telah menghadirkan 170 titik penyalur BBM 1 Harga di berbagai wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) RI. Awalnya ditarget hingga akhir 2019, program ini tuntas lebih cepat daripada yang dicanangkan.



Beroperasinya 170 titik tersebut ditandai dengan diresmikannya 13 titik penyalur BBM 1 Harga oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang didampingi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa, Jumat (11/10/2019). Ketiga belas penyalur BBM 1 Harga ini merupakan titik 158 sampai dengan 170 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Pada kesempatan tersebut, Fanshurullah Asa melaporkan, dari penugasan kepada BPH Migas untuk mengawal Program BBM 1 Harga tentang Percepatan Pemberlakuan 1 Harga JBT dan JBKP secara Nasional, telah dibangun 170 titik penyalur BBM 1 Harga.

"Rinciannya 160 Penyalur dibangun oleh PT.Pertamina (Persero) dan 10 Penyalur oleh PT AKR Corporindo, Tbk. Adapun sebaran 170 titik penyalur BBM 1 Harga di seluruh wilayah Indonesia, yakni Sumatera 31 titik, Jawa 3 titik, Kalimantan 42 titik, Bali 2 titik,

Nusa Tenggara 25 titik, Sulawesi 17 titik dan Maluku-Papua 50 titik," bebernya.

Fanshurullah menilai manfaat dari kebijakan BBM 1 Harga ini sangat besar. Selain mewujudkan kemandirian ekonomi,

penghematan pengeluaran BBM yang diharapkan diikuti dengan penurunan harga sembako. BBM 1 Harga juga membawa dampak positif bagi perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. ★



Tekan Harga BBM Non Subsidi, Pemerintah Pangkas Iuran Badan Usaha

Pemerintah memangkas iuran Badan Usaha kepada Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), dengan menerbitkan PP No. 48 Tahun 2019. Pemangkasan tersebut bertujuan agar harga BBM non subsidi lebih murah.



Menurut Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, pihaknya ingin agar badan usaha dapat melakukan efisiensi dengan pengurangan iuran ini. Sehingga, harga BBM non subsidi bisa kompetitif dan murah.

"Itu aturan yang lama kan (PP No. 01 Tahun 2006) sudah 20 tahunan lebih ya. Alasan kami karena BPH Migas mau membantu agar harga BBM non subsidi lebih kompetitif. Ini juga memang masukan

dari badan usaha, kita bantu mereka efisiensi sehingga harga bisa kompetitif," ujar Fanshrullah Asa, Kamis (15/8/2019).

la meneruskan, selama ini industri migas dibebankan banyak komponen iuran, termasuk iuran dari pihaknya. Untuk itu, dia memangkas jumlah iurannya dengan harapan harga BBM non subsidi jadi murah.

"Kan komponennya tuh dia banyak ya harga impor berapa, margin berapa, belum kena pajak lagi, ditambah sama iuran kita. Nah kami kecilkan lah iurannya ke kami, supaya bisa lebih murah harganya," ujar Fanshrullah Asa.

Sejauh ini menurut Ifan ada sekitar 63 juta kiloliter (kl) BBM yang masuk objek iuran. BBM tersebut merupakan BBM non subsidi.

"Total BBM non subsidi yang terkena objek iuran itu objeknya 63 juta kl, itu diluar subsidi. Jadi kalau kita turunkan iuran, harapannya bisa lebih efisien gitu," katanya.

★





Dorong Kegiatan Hilir Migas, BPH Migas Selenggarakan Hilir Migas Expo 2019

Dalam rangka mendorong pertumbuhan kegiatan usaha hilir migas serta sebagai salah satu rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pertambangan ke-74 dan HUT Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) ke-16, BPH Migas mengadakan Hilir Migas Expo 2019 di Assembly Hall, JCC Senayan, Jakarta 27-28 Oktober 2019. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar bersama Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa resmi membuka kegiatan expo di bidang hilir migas untuk pertama kalinya tersebut.

Hadir dalam pembukaan Hilir Migas Expo 2019 ini antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kakorsabbara Baharkam Polri Irjen Pol Bambang Ghiri dan Komite BPH Migas.

Tema Hilir Migas Expo 2019 ini adalah "Menyongsong Revolusi 4.0 dalam Industri Hilir Migas". Hilir Migas Expo 2019 terdiri dari berbagai kegiatan, seperti seminar dengan beberapa pembicara yang ahli di bidangnya

serta pameran yang diikuti oleh badan usaha, perguruan tinggi, dan unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM.

Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada bupati dan badan usaha yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah, BPH Migas menganugerahkan kepada bupati/pemerintah daerah terbaik yang telah melaksanakan program BBM 1 Harga, bupati/pemerintah daerah terbaik yang

telah melaksanakan program sub penyalur BBM, serta kepada para badan usaha yang telah memberikan kontribusi besar serta patuh dalam pengeloan PNBP iuran.

Dalam acara tersebut, Arcandra mengatakan, "Saya menyambut baik pelaksanaan Hilir Migas Expo 2019 ini karena kegiatan ini merupakan momentum yang tepat dalam pembenahan tata kelola kegiatan hilir migas yang dituntut untuk memiliki pelayanan yang lebih cepat,



lebih mudah, dan berbiaya murah. Saya harapkan BPH Migas dapat menuju ke arah tersebut karena tugas BPH Migas ke depan akan semakin berat. Tuntutan kemajuan teknologi yang begitu pesat serta pola gaya hidup manusia akan menjadi ancaman dalam pengelolaan kegiatan hilir migas”.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menyampaikan, “Hilir Migas Expo ini adalah event pertama kami yang kami harapkan dapat mendorong pertumbuhan

kegiatan di usaha hilir migas. Di acara ini pun, kami siapkan *business dealing area* untuk para badan usaha yang memang akan melakukan kerja sama karena kami membuka ruang dan waktu bagi para badan usaha di sektor hilir migas untuk dapat berinteraksi. Kami harapkan ini dapat menjadi momentum pengelolaan hilir migas yang lebih baik”.

BPH Migas, lanjut Fanshurullah Asa, juga berharap dapat mewujudkan lima visi

Presiden Joko Widodo. Sehingga diharapkan tujuan menciptakan energi berkeadilan dapat segera terlaksana.

“Kami sampaikan bahwa BPH Migas ingin mewujudkan lima visi presiden, yaitu infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, SDM unggul, dan menggunakan APBN tepat sasaran,” tuturnya. ★



Badan Pengatur Hilir Migas Menjamin Distribusi Bahan Bakar Minyak Hingga ke Pelosok Negeri...



Visi

Terwujudnya penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatnya pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Misi

Melakukan pengaturan dan pengawasan secara independen dan transparan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri



Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
www.bphmigas.go.id